

BIDIK

NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api

JAKARTA, BN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru yang merupakan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan.

"Kami menyampaikan terkait jalur kereta, sudah ada (pejabat

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Tessa Mahardhika Sugiarto. (ant)

KONSULTAN PROYEK "SILUMAN" MARAK DI JOMBANG

□ Sembunyikan Nama Konsultan, Proyek Rehab Dispindik Rawan Korupsi



JOMBANG, BN - Dugaan adanya suap maupun gratifikasi atau tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang dan jasa sering terjadi kompetisi yang acap kali dilakukan tidak fair, sehingga berpotensi terjadinya suap dan gratifikasi, ini diduga adanya tindak pidana korupsi. Seperti terlihat jelas dan bisa dilihat di beberapa proyek rehab Dinas Pendidikan Jombang awalnya terkait dengan "Papan proyek" yang tidak pernah terlihat dicantumkan nya nama konsultan. Ada apa?

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Papan proyek semua tanpa mencantumkan nama Konsultan Perencanaan dan Pengawas

Relawan Santri Derek Kyai Deklarasi Dukong Khofifah-Emil



Ribuan relawan Santri Derek Kyai saat deklarasi di Sidodadi, Sidoarjo.



Kordinator relawan Santri Derek Kyai Slamet Budiono. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Ribuan relawan Santri Derek Kyai di bawah naungan Gus Ipul menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Deklarasi ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Ar Ridho, Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Sabtu (16/11/2024) siang.

Koordinator relawan Santri Derek Kyai

Sidoarjo, Slamet Budiono, menyampaikan bahwa ribuan santri dan santriwati yang tergabung dalam kelompok tersebut sebelumnya merupakan berada di barisan Gus Ipul. Namun, kini mereka sepatat untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil agar melanjutkan masa jabatan untuk periode kedua.

"Santri-santriwati perwakilan dari setiap kecamatan di Sidoarjo ini siap memenangkan pasangan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

KPK Periksa Cabup Sidoarjo Achmad Amir Aslichin, Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah



Achmad Amir Aslichin saat wawancara media. (Teddy Syah Roni)

SIDOARJO, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Achmad Amir Aslichin, atau yang akrab disapa Mas Iin, beserta 11 orang lainnya sebagai saksi penyidikan, pada Senin (11/11/2024). Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur, tahun 2021-2022.

Pemeriksaannya dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Raya Bandara Juanda No. 38,

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Setelah 34 Tahun, H. Saluki Berhasil Kuasai Tanah 6,34 Hektar di Genting

□ Hartono Motor Salah Klaim Lokasi



Lokasi tanah di Genting seluas 6,340 Hektar diratakan oleh alat berat bego. Haji Saluki (inset). (Ak)

SURABAYA, BN - Setelah melalui perjuangan dan pengorbanan selama 34 tahun dalam mengembalikan tanah hak ahli waris H. Moch. Anwar, H. Saluki kini berbangga telah berhasil menguasai obyek tanah seluas 63.400 meter persegi alias 6,34 hektar yang terletak di Genting, Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

Penguasaan secara fisik oleh H. Saluki dengan jalan telah melakukan pembersihan, pemerataan kondisi tanah yang sebelumnya sarat dengan tumpukan sampah, tetumbuhan yang merusak pemandangan dan dilanjut dengan pengukuran tanah, kemudian dijual.

Awalnya pada 31 Oktober 2024, team H.Saluki telah membongkar lima buah papan nama Hari B dan Hartono yang mengklaim tanah di Genting itu bersertifikat. Adapun papan nama tersebut empat buah yang masing-masing mencantumkan empat nomor sertifikat yang sama dan satu lainnya berbunyi "Tanah Milik PT. Wisma Hartono Jaya" di pintu depan keluar masuk warga Genting.

Meskipun beda nama yang tertulis di ke-4 papan nama tersebut, namun semuanya mencantumkan nomor sertifikat yang sama. "Jadi dari papan namanya saja sudah salah besar, juga lokasi tanahnya salah. Bukan di tanah Genting ini," tandas Saluki pada media Bidik Nasional (BN) di lokasi tanah Genting, asal November 2024.

Sehari sebelumnya, Saluki mendatangkan alat berat (bego) untuk langkah pembersihan lokasi tanah yang penuh sampah dan ilalang kering sudah puluhan tahun, bahkan beberapa kali terjadi kebakaran yang belum diketahui sumber apinya.

Penguasaan tanah tersebut, kata Saluki, diperoleh dengan jalan benar menurut hukum

dan ahli warisnya jelas dari H. Moch. Anwar sehingga mendapatkan kuasa mengurus, menempati dan menjual dari ahli waris tersebut yang sudah disahkan oleh notaris di Surabaya, Bachtiar Hasan.

Selain itu, masalah hukum yang paling penting, lanjut pengusaha jual beli mobil itu, adalah tidak terbuktinya Saluki melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) di Satgas Mafia Tanah/Bareskrim Mabes Polri ketika diperiksa pada 16 Mei 2024 gara dia menempati diatas tanah Genting yang diklaim pihak Hartono Motor sebagai miliknya, padahal tanah yang disertifikatkannya salah lokasi dan salah ahli warisnya.

Sehingga Saluki memiliki dasar yang kuat untuk menolak keras keberadaan sertifikat atas nama Hari B dan Hartono, kemudian pihaknya tak ragu lagi mencabut semua papan nama dari pihak Hartono Motor.

Terobosan hebat yang dilakukan pula oleh Saluki, yakni dengan mengirim surat pengaduan kepada Presiden Joko Widodo pada September lalu, sebab di lokasi tanah Genting tersebut terdapat pula pajangan gambar presiden bersama wakil presiden, sebagai pimpinan negara yang anti mafia tanah dan sekaligus minta perlindungan.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah kepada Ahmad Taufik,SH, yang diketahui sebagai kuasa hukum pihak Hartono Motor melalui telepon whatshaap (WA) saudaranya mengatakan, pihaknya tidak tahu tentang perkembangan yang terjadi diatas tanah Genting yang sudah 34 tahun dibiarkan kosong tersebut. "Ada penjaganya disana, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang," kata pengacara tersebut singkat. (Ak)



Ini empat papan nama pihak Hartono Motor yang dicabut tim H. Saluki. (Ak)

Tuding Kesalahan Developer, Pembeli Rumah Perum Safira Juanda Tolak Bayar Kelebihan Tanah



Pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva bersama kuasa hukumnya. (Teddy Syah Roni)

□ Kasusnya Berlanjut di PN Sidoarjo

SIDOARJO, BN - Pasangan suami istri (Pasutri) Didik Noga Ahfidianto dan Eva mengaku keberatan atas permintaan pihak PT CDN, pengembang perumahan, yang meminta mereka membayar kelebihan tanah pada rumah yang dibeli melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Rumah tersebut berlokasi di Perumahan Safira Juanda, Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

"Kami keberatan diminta membayar kelebihan tanah di rumah yang saya beli," ujar Eva dengan nada emosional saat konferensi pers di kediamannya, Jumat (15/11/2024). Ia didampingi kuasa hukumnya, Rohmad Amrullah.

Eva menjelaskan bahwa ia bersama suaminya membeli rumah tersebut seharga Rp 1,7 miliar dengan diskon pada tahun 2018. Rumah yang mereka beli adalah unit tipe Miltonia yang sudah berupa bangunan jadi.

Ia mengungkapkan, tidak tahu ada kelebihan tanah, baru setelah sekitar tiga tahun menempati dan beberapa bulan lalu disomasi oleh pengembang, baru tau kalau ada kelebihan tanah. Menurutnya, ia saat beli sudah berupa bangunan rumah itu.

Lanjut Eva, permintaan dari pembayaran kelebihan tanah tersebut menjadi beban berat, apalagi mereka masih harus mencicil KPR sebesar Rp 14 juta per bulan selama 10 tahun. "Masak kami harus dipermasalahkan, sementara kami juga masih membayar angsuran setiap bulan," ujarnya.

Kuasa hukum pasangan tersebut, Rohmad Amrullah, menyatakan kliennya sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, pihaknya keberatan dengan harga kelebihan tanah yang ditawarkan pengembang.

"Harga yang ditawarkan sangat mahal sehingga klien kami menolak. Mereka merasa tidak mampu membayar dengan harga tersebut,"

"Kasus ini saat ini sedang

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Tunjungan 86-88 Lt. 1/28 Surabaya atau Hubungi Bos EDY, (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Gagal Mediasi, Tergugat I Pemalsuan Waris Berhadapan Dengan Gugatan Saudara kandungnyanya



Sidang Gugatan Pembatalan AJB dengan Waris Tunggal diduga palsu kini masuk Sidang Pokok Perkara. Membelakangi lensa adalah kuasa hukum penggugat. (AK)

SURABAYA, BN - Setelah gagal mediasi yang dipandu hakim mediator PN Surabaya belum lama ini, Hosairiyah selaku Tergugat I, Irwansyah sebagai Tergugat II dan Turut Tergugat Notaris di Surabaya, Wibowo Ibo Sarwono, SH., MH. berhadapan dengan sidang pokok perkara perdata atas gugatan Faridah dan Nur Hotimah, keduanya juga kakak beradik selaku penggugat.

Kedua bersaudara tersebut, menduga keras bahwa Tergugat I Hosairiyah yang merupakan saudara kandung dari para penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menjual sendiri tanah/rumah seluas 46 meter persegi di Jln. Bulak Banteng Wetan Langgar II, Semam-

pir, Surabaya kepada Irwansyah, padahal obyek tersebut merupakan warisan bersama kakak beradik tersebut.

Dalam gugatan PMH dengan Register Perkara Nomor : 880 / Pdt.G / 2024 / PN. tertanggal 29 Agustus 2024 tersebut, penggugat Faridah dan Nur Hotimah menyatakan, bahwa para penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Soepari dan Rochimah atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bulak Banteng Wetan Langgar II dengan ukuran luas tanah 46 meter persegi Register C No 358 di mana tanah/rumah tersebut sebagai milik orang tuanya yang sudah Almarhum.

Kemudian dalam gugatannya terhadap Hosairiyah dan Irwansyah tersebut,

secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, Hosairiyah yang juga saudara kandung para penggugat telah menjual rumah warisan tersebut kepada Irwansyah dengan membuat keterangan waris tunggal (diduga palsu) dan melakukan perjanjian pengikatan jual beli kepada Notaris Wibowo Ibo Sarwono, SH., MH. beralamat di Jl. Kali Rungkut Surabaya.

Atas hal tersebut Faridah dan Nur Hotimah melalui Kuasa Hukumnya, Dr Amatussudin, SH., MH., Nor Cholis, SH., MH., RR Istu Hardiyanti, SH., dan Amin, SH., mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum.

Dr. Amatussudin, SH., MH. didampingi Nor Cholis SH MH dan rekan lainnya menyatakan, bahwa masalah ini awal mulanya rumah warisan tersebut dikontrol oleh saudara Irwansyah kurang lebih 5 tahun dengan sistem kontrak setiap tahunnya seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Namun sekitar 2018, terjadi transaksi jual beli dengan membuat waris tunggal yakni Hosairiyah sendiri tanpa diketahui ahli waris lainnya dalam hal ini para Penggugat.

Dalam sidang mediasi

yang ternyata hasilnya kandas itu sebenarnya sudah ada itikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memotong biaya kontrakan atau biaya sepeserpun.

Hakim Mediasi juga telah menyarankan agar berdamai karena uang masuk ke Hosairiyah mau dikembalikan, namun Tergugat II bersikukuh tidak mau berdamai dengan dalih mengikuti perjanjian awal yaitu adanya akte jual beli antara dirinya dengan Hosairiyah dengan mengesampingkan fakta hukum yang sebenarnya.

Advokat yang dikenal sering menyelesaikan perkara non litigasi atau diluar pengadilan ini sangat menyangkal gagalnya perdamaian ini, karena bagaimanapun juga damai itu indah dan jika perkara berlanjut tentu yang rugi pihak yang berperkara.

Nor Cholis, SH., MH. mengatakan, bahwa petitum yang diajukan kliennya adalah jelas yakni pembatalan akte jual beli dari notaris Wibowo Ibo Sarwono, dan ganti kerugian "Pada agenda sidang pokok perkara nanti akan dihadirkan para saksi," ujar Nor Cholis.

(AK)

Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan 5,9 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 8,25 Miliar



Pemusnahan rokok ilegal di PT Hijau Alam Nusantara. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN - Dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) memusnahkan sebanyak 5.973.164 batang rokok ilegal pada Selasa (12/11/2024). Kegiatan ini berlangsung di PT Hijau Alam Nusantara, Mojokerto, dengan metode pembakaran.

Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama periode Juni hingga September 2024. Total nilai barang ilegal ini mencapai Rp 8,255 miliar.

Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan mengungkapkan bahwa langkah pemusnahan ini bertujuan untuk mencegah rokok ilegal kembali beredar di pasaran. "Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi industri rokok resmi," ujar Rudy.

La menambahkan, peredaran barang ilegal ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,439 miliar. Rokok ilegal yang dimusnahkan ditemukan dengan berbagai modus pelanggaran, seperti penggunaan pita cukai bekas, palsu, hingga penyalahgunaan pita cukai untuk jenis rokok yang berbeda, wilayah operasi penindakan meliputi Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto.

Proses pemusnahan itu dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, PT Hijau Alam Nusantara menggunakan metode pembakaran yang dirancang untuk meminimalkan polusi udara.

Rudy juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan peredaran rokok ilegal di wilayah mereka. "Kami berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,"

"Pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai," pungkas Rudy. (Ted)

Pj Bupati Pamekasan Beri Penghargaan Pemuda Berprestasi



Pj bupati Pamekasan Masrukin saat memberi penghargaan pemuda berprestasi.

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabupaten Pamekasan menggelar upacara peringatan hari sumpah pemuda di lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati, Senin 28/10/2024. Pada kesempatan itu pula Pj bupati Pamekasan Masrukin S.sos Msi yang bertindak sebagai inspektur upacara juga sekaligus memberikan penghargaan untuk pemuda prestasi di daerahnya berupa uang pembinaan.

Peserta upacara diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan TNI/POLRI serta perwakilan siswa, organisasi kepemudaan di kabupaten Pamekasan.

Dalam sambutannya Pj bupati Pamekasan membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo bahwa, saat ini bangsa Indonesia sedang memperingati peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa sumpah pemuda tahun 1928. Menurutnya, pemuda Indonesia waktu itu memiliki itikad kuat untuk bersatu di tengah keragaman dan penjajahan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Oleh sebab itu, nilai perjuangan para pemuda senantiasa harus di dengarkan guna menguatkan kesadaran karakter bangsa Indonesia menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang cepat.

"Peringatan hari sumpah pemuda tahun 2024 berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target pembangunan jangka menengah sebagai landasan target pembangunan jangka panjang tahun 2045," tandasnya. (noerkholis)

Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan "Menuju Informatif" Ajang KI Awards 2024

SIDOARJO, BN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan Kategori "Menuju Informatif" ajang Komisi Informasi (KI) Awards 2024. Dalam ajang penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini diselenggarakan oleh KI Jawa Timur, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Badan Publik di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Badan Publik Pemerintahan Kabupaten / Kota se-Jawa Timur, yang dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Forkopimda, dan Ketua Komisi Informasi Pusat, ini menjadi ajang apresiasi bagi badan publik yang berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi di wilayah Jawa Timur.

Pjs Bupati Sidoarjo M. Isa Anshori menerima penghargaan langsung pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Jatim, yang dilaksanakan Rabu malam (13/11) di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya.

Rasa bangga hingga ucapan terima kasih disampaikan



oleh Pjs Bupati Sidoarjo kepada Sekda Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama yang telah memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat dalam mendukung IKIP secara terstruktur dan masif untuk terus ditingkatkan kedepannya.

"Ini adalah hasil kerja luar biasa PPID di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo, kecamatan, kelurahan dan Desa yang telah berhasil memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat," ungkap Isa.

Adhy Karyono, Pj Gubernur Jawa Timur, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi.

(yah)



Tek: Paslon Subandi-Mimik saat ziarah ke makam para tokoh di Sidoarjo. (Foto: ist)

Paslon Subandi-Mimik Ziarah ke Makam Para Tokoh Sidoarjo, Mohon Kelancaran Pilkada 2024

SIDOARJO, BN - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, melakukan ziarah ke makam para wali dan tokoh sejarah penting di Sidoarjo pada Selasa, 12 November 2024.

Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu sekaligus memanjatkan doa dan harapan agar perjalanan mereka dalam Pilkada 2024 diberikan kelancaran dan keberkahan.

Keduanya memulai ziarah di Makam Auliya Sono, tempat peristirahatan beberapa tokoh besar, termasuk KH. Muhayyin, pendiri Pondok Pesantren Sono Buduran.

Subandi dan Mimik datang dengan pakaian sederhana sarung, baju putih,

dan kopyah hitam, menunjukkan kerendahan hati dan sikap hormat mereka. Mereka didampingi oleh Gus Hasan dari Buduran, yang memimpin doa dan tahlil untuk para tokoh yang dimakamkan di sana.

"Makam Auliya Sono menjadi simbol keluhuran budi dan pusat spiritual masyarakat Sidoarjo. Ini menjadi pengingat bahwa kami harus berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan oleh para ulama dan tokoh agama," ujar Subandi.

La menambahkan bahwa ziarah ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar batin untuk memohon ridha Allah SWT atas langkah-langkah yang diambil dalam Pilkada 2024. Setelah prosesi doa dan tabur bunga di Auliya Sono, perjalanan

■ Bersambung ke hal.8 kol.1

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi. SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Hollilurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN : Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiawati, Arif Mustofa. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino Wiwantara. BLITAR

: Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chormelis (Kabiro), Hari Sulisty. BONDOWOSO : Rukwandanu. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Surtipo, Sugeng Purnomo. JAWA TENGAH : BLORA : Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. REMBANG : Didik Eko Sulistiawan. WONOGIRI : Heryanto. SEMARANG RAYA : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOYOLALI : Hendarli. TEMANGGUNG : Ahmad Mukhlis (Kabiro), Novan Argunanto. JAWA BARAT : CILACAP : Asep Saepudin (Kabiro), Suyatno, Carsono Adi Paulana. MAGELANG : Marno. ST. BANDUNG : Zaenal Ikhsan (Kabiro). CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN : Asep Sujana. SUMEDANG : Ernawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN : Edwar Panata Muda. PURWAKARTA : Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENGWAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG : Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU : Marno Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rifly Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BARAT/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Sirlani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, Oku TIMUR : Nelli Sri Wahyuni. OKI : Nurli Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN : Muhammad Syaifei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAN : Suryadarma (Kabiro), Redfial. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN : Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Dimanto, Sutrisno. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL : Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG : Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT : Joni Efendi. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM : Hidayatul Aini (Kabiro). LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ ADMINISTRASI/KEUANGAN : Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 0877481403562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Pagelaran Reksa Budaya Panji : Ajang Pelestarian Seni dan Budaya di Kabupaten Kediri



Pagelaran Reksa Budaya Panji tema "Kentrung: Hidup Segan, Mati Tak Mau" di kawasan Wisata Sumber Agung, Sabtu (9/11).

KEDIRI, BN - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, menyelenggarakan acara bertajuk Pagelaran Reksa Budaya Panji dengan tema "Kentrung: Hidup Segan Mati Tak Mau" di kawasan Wisata Sumber Agung, Sabtu (9/11).

Acara ini berlangsung dari pagi hingga malam dan menghadirkan berbagai atraksi seni dan budaya untuk melestarikan kekayaan budaya lokal. Bagi warga atau masyarakat sekitar yang datang dan menyaksikan pagelaran tersebut juga bisa mendapatkan hadiah apabila menang undian.

Beragam kegiatan seni budaya ditampilkan dalam acara ini, mulai dari pameran UMKM, seni pahat, kesenian Krucil, Barong, keterampilan batok, terakota, pagelaran tari, karawitan, pagelaran kentrung, hingga sendra tari Panji Semarang. Kesenian tari ini dimainkan oleh siswa-siswi dari berbagai sekolah, mulai dari SD/MI, SMP, hingga SMA di Kecamatan Grogol, Banyakan, dan Tarokan.

Kepala Desa Sonorejo, Abdul Choliq Efendi, menyampaikan bahwa pagelaran Reksa Budaya Panji ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali budaya yang hampir punah.

Abdul Choliq juga menjelaskan bahwa Desa Sonorejo secara rutin mengadakan kegiatan Expo Pelangi setiap bulan, di mana panggung seni diisi dengan pertunjukan budaya khas daerah setempat. Pagelaran Reksa Budaya Panji ini merupakan yang pertama kali diadakan di wilayah barat Sungai Brantas, dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin demi keberlanjutan budaya lokal. (Advkominfokabkdr/ND)

Pemerintah Kabupaten Kediri Dorong Pembudidaya Lele Kembangkan Produk UMKM



Pjs Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, ketika meninjau dua sentra produksi ikan lele terbesar di Pare, Rabu (6/11/2024).

KEDIRI, BN - Pjs Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, mendorong pembudidaya lele tidak hanya menjual ikan segar, tapi mengolahnya menjadi produk khas Kediri. Hal tersebut disampaikan Heru ketika meninjau dua sentra produksi ikan lele terbesar. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (6/11/2024) di Kecamatan Pare.

Saat berada di lokasi pembudidaya lele, Heru meyakini budidaya ikan lele di Kediri memiliki potensi besar. Ia mendorong pembudidaya untuk mengolah ikan lele menjadi menu andalan daerah. "Hari ini kami berkunjung untuk melihat proses produksi mulai pembibitan hingga pembesaran yang dilakukan para pembudidaya," ujar Heru.

Banyak para pelaku UMKM di Kediri telah berinovasi dengan berbagai olahan ikan lele. Olahan tersebut mencakup sate lele, keripik lele, nugget lele, dan abon lele.

Jajak, karyawan di Peternakan Ikan Kusuma Karya Catfish, menjelaskan jumlah kolam yang ada. "Ada 72 kolam untuk pembibitan dan 1.300 kolam untuk pembesaran," katanya.

Dengan lahan yang ada, produksi ikan lele di peternakan ini mencapai 5 ton per hari. "Kami membutuhkan lima unit truk untuk pengangkutan," tambah Jajak.

Sementara itu, Muhammad Yusron, Presiden Republik Lele, menjelaskan tentang proses budidaya ikan lele. Yusron menambahkan, kami mampu memproduksi 10 ton ikan lele setiap hari yang siap dipasarkan.

Dengan kolaborasi antara pembudidaya lele dengan UMKM merupakan strategi Pemkab Kediri untuk mendukung program menurunkan angka stunting. Saat ini, kasus stunting di Kediri mencapai one digit stunting yaitu 7,46 persen pada pertengahan 2024. (Advkominfokabkdr/ND)

Nyalur Listrik untuk PJU, Didenda PLN Rp 40 Juta

❑ Kuasa Hukum Rudy Hartono : Klien Saya Minta Keadilan PLN

BLITAR, BN - Rudi Hartono (52) tahun Warga RT 1/RW 4 BTN Tlogo Permai, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, keberatan usai dikenai denda dari PLN sebesar Rp. 40 juta. Hal itu terjadi karena diduga dia kedapatan menggunakan listrik secara ilegal.

Pantauan awak media ini di lokasi, sambungan listrik yang berada di pos dekat rumah wakil Ketua RT 1/RW 4, Desa Tlogo yang berada di tepi ujung jalan tersebut sebelumnya memang terhubung ke bengkelnya, sebelum diputus kembali oleh pihak PLN.

Dalam keterangannya pada surat denda yang diberikan PLN, kesimpulan pelanggaran karena menggunakan energi listrik tanpa hak dengan cara menyambung kabel. "Denda itu karena kita dituduh memakai listrik tanpa izin, padahal untuk penerangan jalan umum. Dendanya sebanyak Rp. 40 juta," jelas Rudi pada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Rudi menjelaskan, banyak juga warga lain di lingkungannya yang menggunakan listrik seperti ini. "Kalau mau bersih-bersih harusnya semua, ya ayo, jangan cuma saya yang dijadikan kambing hitam," ucapnya bernada kesal.

"Maka dari itu saya keberatan dengan adanya denda yang di dua tempat itu nilainya Rp. 40 juta, karena itu di tempat umum yang bukan tanah saya, bukan milik saya pribadi," tandasnya.

Sementara itu, Purwanto selaku TETL PLN Kota Blitar menerangkan bahwa klaim tersebut ditemukan atas temuan adanya sambungan listrik ilegal.

"Beberapa waktu lalu kita melakukan pemeriksaan di Perumahan BTN Tlogo pada awalnya kita melihat ada sambungan listrik yang ilegal artinya sambungan tanpa melewati alat ukur dan pembatas PLN. Pada saat itu sambungan ilegal memang mengarah ke pos dan memang saya amat memang digunakan untuk penerangan jalan. Kemudian pengecekan lebih lanjut dari saluran kabel yang dijalan itu ternyata dipakai masuk ke garasi kemudian kita cek lebih lanjut ada lampu ada stop kontak kalo tidak salah sekitar 10 lebih dan kalo menurut kami penerangan jalan memang ada, namun ketika kami periksa disana dipakai untuk penerangan garasi dan juga stopkontak kalo ada itu merupakan indi-

kasi tidak dipakai untuk penerangan saja tapi juga untuk kegiatan lain."

Untuk yang ada di timur pos itu, lanjutnya, "Memang ada 1 titik lampu yang diambil langsung dari tiang BTN tanpa melewati alat ukur dan pembatas PLN. Disitu juga sama pakai mcb pembatas 16 amper kalo di PLN dayanya 3600. Disitu juga ada stopkontak menurut asumsi kami kalau ada itu tidak hanya dipakai untuk penerangan jalan tapi juga untuk yang lain," jelasnya.

Purwanto juga menambahkan jika masyarakat membutuhkan penerangan jalan harus melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan. "Untuk PJU yang mengelola itu Dinas Perhubungan baik Kabupaten Atau Kota ketika ada warga yang menginginkan penerangan jalan di wilayahnya bisa koordinasi lewat pemerintah desa dan nantinya akan di survei. Harapan kami PJU ilegal bisa dikurangi dan dipasang KWH meter agar bisa terukur pemakaian listriknya. Ini tadi Kami sepakat bersama bapak Rudy untuk pengecekan bersama dan melibatkan pemerintah desa agar ada usulan titik penerangan yang dibutuhkan tidak serta merta mengambil listrik dari kabel PLN yang merupakan pelanggaran. Jika memang untuk penerangan jalan harus koordinasi dulu dengan Dinas Perhubungan kemudian ditindaklanjuti," ujarnya.

Saat awak media menanyakan mengapa klaim mengarah pada Rudy Hartono, Purwanto menjelaskan aturan PLN. "Dasarnya kita melihat yang memanfaatkan dari hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan temuan yang disaksikan pak Rudy dan anggota kepolisian. Kita selalu koordinasi dengan pemakai dan pihak berwajib terlepas itu rumah itu dikontrak tetap itu yang tanggungjawab mengontrak pada saat itu. Jejak digital kan ada di MAP update setiap tahun pada saat kita periksa kebetulan yang kami periksa ada kendaraan fuso dalam hal ini yang bertanggungjawab pak Rudy. Dijejak digital itu ada kabel keleran yang dikeler dipakai untuk perbaikan. Pak Rudy tadi menyampaikan pernah makai dan untuk kepentingan umum. Untuk nominal denda itu berdasarkan aturan PLN untuk didaerah ini memakai mcb 10 amper setara daya 2200 PLN

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Wartawan saat mewawancarai Rudy Hartono warga Tlogo.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono - Lumajang
WWW. Pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.Com, Telepon. 8781874

RELAAS PANGGILAN SIDANG (KEDUA)
Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 November 2024, saya H. Teguh Santoso, S.H., sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lumajang atas perintah Majelis Hakim dalam perkara Nomor 537/Pdt.P/2024/PA.Lmj

TELAH MEMANGGIL

TEDI IBNU KURNIAWAN BIN JAEDI, SP.H bertempat tinggal dahulu di Dusun Pangung Lombok Lor RT. 006 RW 005 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, telah hilang sejak tahun 2019 telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lumajang pada:

Hari/tanggal : Selasa / 20 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 (dua) Pengadilan Agama Lumajang
Jl Soekarno Hatta No 11 Sukodono, Kabupaten Lumajang

untuk pemeriksaan perkara Permohonan Penetapan Orang Hilang (Mafqud), yang diajukan oleh:
RINO AGUNG SETIAWAN BIN JAEDI, SP.H. sebagai Pemohon

Dikarenakan TEDI IBNU KURNIAWAN BIN JAEDI, SP.H tersebut telah hilang sejak tahun 2019, maka Panggilan ini saya umumkan melalui koran Bidik Nasional agar diumumkan kepada khayalak ramai dan diumumkan pula dengan menempelkan di Papan Pengumuman pada Pengadilan Agama tersebut dengan berpedoman pada Pasal 467 KUH Perdata;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang memanggil
Jurusita Pengganti
H. Teguh Santoso, S.H.

Dobrak Kreativitas Anak Muda, Disparpora Kabupaten Madiun Gelar Pentas Musik



Memperingati hari Pahlawan, Disparpora gelar pentas musik bersama Komunitas Musik Caruban, di gedung Kampung Pesilat. Jumat (15/11/2024).

MADIUN, BN - Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menggelar pentas musik bersama Komunitas Musik Caruban. Bertempat di gedung Kampung Pesilat, komunitas musik membawakan lagu-lagu legendaris dari musisi terkenal Indonesia. Para penonton pun terhanyutkan suasana era tahun 90-an. Adanya event ini, selain mendobrak kreativitas anak muda juga sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap musisi kreatif di Kabupaten Madiun.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Madiun Hamzah Nugro-

hato mengatakan, kegiatan ini untuk memfasilitasi anak-anak muda di sektor musik dalam rangka memperingati hari Pahlawan 10 November. Harapannya, mereka dapat berperan aktif bagi ekonomi kreatif di Kabupaten Madiun. Disparpora juga akan melakukan pembinaan bagi anak-anak muda yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sehingga produk-produk yang dilahirkan mampu mendongkrak nilai ekonomi di bumi kampung pesilat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak muda kita yang tergabung dalam sektor musik dalam rangka memperingati

hari Pahlawan 10 November tahun 2024. Diharapkan, dengan fasilitasi ini mereka akan mampu memberikan peran aktif yang lebih baik untuk Kabupaten Madiun, khususnya ekonomi kreatif sehingga ekonomi yang berada di masyarakat ini akan selalu bergerak dan kami dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan melakukan pembinaan lain agar kreativitas mereka dapat menyalurkan pada tempat yang baik dan mampu memberikan nilai ekonomi yang positif," terang Hamzah.

Sementara itu, salah seorang warga mengaku salama-tung senang dan bahagia

dengan adanya event ini. Tak hanya untuk memajukan musik di Kabupaten Madiun, bagi anak-anak muda mereka juga mengharapkan adanya wadah pembinaan bagi anak-anak muda pencinta musik sehingga mereka dapat mengeksplorasi diri dan mampu menjunjung tinggi dunia permusikan di Kabupaten Madiun maupun kelas nasional.

"Hari ini alhamdulillah memajukan generasi muda untuk lebih mencintai musik di tanah negeri dan memajukan kesenian musik di Kabupaten Madiun. Harapannya, mudah-mudahan untuk kedepan bisa membentuk wadah bagi generasi muda yang akan datang. Jadi kita perlu wadah, kita perlu tempat, kita perlu support dari Pemerintah Kabupaten Madiun," ungkapnya.

Pada event ini, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa membawakan beberapa lagu legendaris dari musisi kawakan tanah air yakni Pelangi Boomerang, Rumah Kita God Bless dan Andaikan Kau Datang Kembali dari Koes Plus. (Bas)

Pj Bupati Pamekasan Buka Bazar UMKM Bersinergi di Food Colony



Pj Bupati Pamekasan Masrukin saat membuka bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersinergi tahun 2024 di Food Colony.

PAMEKASAN, BN - Pj bupati pamekasan Masrukin S.Sos Msi membuka kegiatan bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersinergi tahun 2024 di Food Colony Jalan Kesehatan kabupaten Pamekasan, Senin malam (4/11/2024).

Kegiatan bazar murah yang diikuti oleh 106 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut di selenggarakan pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) kabupaten Pamekasan yang di mulai pada tanggal 4 hingga 9 November tahun 2024.

Menurut Pj bupati Pamekasan Masrukin, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan, momentum kegiatan bazar murah UMKM tersebut bukan hanya sebagai kegiatan seremonial saja, akan tetapi merupakan langkah awal untuk menjadi pijakan untuk mengangkat perekonomian di kabupaten Pamekasan. "Moment ini tentunya, tidak hanya sekedar seremonial, melainkan menjadi pijakan perekonomian di kabupaten Pamekasan," ungkapnya.

Pada kegiatan bazar UMKM Bersinergi tahun 2024 itu para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan beraneka ragam jajanan, selain itu juga menampilkan lomba parade dan Fashion Show (Gasuc Production Entertainment) dan pertunjukan Seni Budaya (Dewan Kesenian Pamekasan) serta sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

(Noerkholis)

Proyek Gedung TK Dharma Wanita dan PAUD Tunas Cempaka Desa Wonocempoko Ayu Diduga Dikerjakan Asal Jadi



Sekdes Supa'at dan Bongkaran atap TK dan PAUD yang lama dipasang kembali di bangunan yang baru.

LUMAJANG, BN - Pengaduan masyarakat terus bergulir mulainya dikerjakan TK Dharma Wanita dan Paud Tunas Cempaka. Pasalnya tidak ada papan nama yang jelas, anggaran dari mana dan berapa besar nilainya?. Dan terlebih parahnyanya lagi tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pekerjaan asal jadi, juga diduga melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam aturan itu proyek yang tidak memasang papan proyek bisa dikatakan proyek fiktif serta diduga adanya manipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Tim media setelah mendapat informasi dari narasumber yang jelas, langsung pada hari Jum'at (11/10/24) langsung investigasi ke lokasi tersebut, ternyata benar apa yang disampaikan oleh narasumber : 1. Ada tembok yang lama di ruangan bawah kelas dibuat penyangga cor tembok yang baru. 2. Ada pondasi samping kelas yang bawah tembok lama retak dibuat penyangga tangga cor ke atas. 3. Yang lebih parahnyanya lagi yang dibuat untuk besi cor besi 10, yang seharusnya besi tersebut dipakai besi ukuran 12 untuk cor pondasi bangunan atas. 4. Pekerjaannya sangat kasar, sampai sekarang belum ada yang bertanggungjawab menjadi timlak (tim pelaksana) TK dan PAUD, padahal tanah tersebut milik Desa Wonocempoko Ayu.

Hal tersebut sangat memprihatinkan khawatir anak-anak bangsa ini yang menjadi murid TK dan PAUD tersebut dengan bangunan seperti ini sangat berbahaya roboh dan bisa menjadi korban atas bangunan yang tidak sesuai. Kades Wonocempoko Ayu Sutiyono, pada waktu dikonfirmasi acara sedekah desa / ruwat desa pada hari Senin (21/10/24) mengatakan, "Memang betul tanah TK Dharma Wanita dan PAUD Tunas Cempaka milik desa Wonocempoko Ayu, untuk bantuan TK dan PAUD, saya tidak ikut menangan, setahu saya bantuannya dari Provinsi," jelas Kades.

Karena ada informasi bahwa salah satu guru di TK dan PAUD tersebut istri Sekdes Supa'at desa Wonocempoko Ayu, akhirnya tim media menemui sekdes, di depan rumahnya pada Senin (28/10/24) jam 11.50 WIB sesuai gambar diatas, "Ya memang betul saya yang menangan, bantuan tersebut saya juga yang mengajukan selama 2 tahun akhirnya baru berhasil, dan kalau bangunan tersebut jadi masalah akan saya kembalikan dan saya biayai sendiri. Kan enak kalau seperti ini, ada dugaan korupsi ketahuan mau dikembalikan dan memanipulasi demi kepentingan pribadi, juga dugaan memperkaya diri sendiri, kalau nanti ini menjadi berita kan nama saya jadi jelek dan untuk tahun 2025, saya tidak akan dapat proyek ini lagi untuk melanjutkan bangunan tersebut," jelas sekdes Supa'at pada akhir pembicaraan.

Bahkan foto-foto dokumentasi dan rilis berita mau diminta, untuk menghilangkan barang bukti karena tahu kalau PAUD dan TK mau diberitakan, begitu ditanya tentang RAB (rencana anggaran biaya) seperti apa? "Itu rahasia tidak akan saya buka," terang sekdes Supa'at.

Yang jelas, kata sumber BN, bangunan tersebut TK dan PAUD ini perlu di audit dan diduga ada oknum yang berkepentingan untuk memperkaya diri sendiri, layak dilaporkan BPK (badan pengawas keuangan) dan APH (aparap penegak hukum). (tim)

Kades Pandansari Kec Senduro Diduga Salahgunakan Wewenang Anggaran RT/RW 11 Bulan Belum Terealisasi

LUMAJANG, BN - RT adalah Rukun Tetangga dan RW adalah Rukun Warga Lembaga Kemasyarakatan yang berada di tingkat paling bawah dalam hierarki pemerintahan Indonesia. Memiliki tugas; 1) Membantu pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa, 3) Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan, 4) Membuat Laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang sekiranya perlu dilaporkan.

RT dan RW merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertugas untuk membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan juga dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Kemasyarakatan.

Jadi tugas RT dan RW sangatlah penting sekali peranan membantu dalam pemerintahan desa, cuman sayang sekali antara RT-RW dengan kepala desa sering terjadi gesekan, pasalnya hak/gaji RT dan RW sering terlambat untuk diberikan kepada yang mempunyai hak, seperti RT dan RW di 5 dusun desa Pandansari Kecamatan Senduro, pada tahun 2003 selama satu tahun baru diselesaikan/dibayarkan.

Sekarang terulang kembali pada tahun 2024, jelas beberapa RT dan RW yang menyampaikan pada Tim Media pada saat investigasi di Desa Pandansari Kec. Senduro,



Kades Pandansari Lasmu'i dan bangunan ruang pertemuan tidak kunjung selesai sampai sekarang.

ruangan pertemuan desa/padepokan desa tidak kunjung selesai/dikerjakan sama sekali dengan Kepala Desa Pandansari Lasmu'i, dengan anggaran ADD (Anggaran Dana Desa) akhirnya Tim Media yang sudah investigasi beberapa kali ke Desa Pandansari Kec. Senduro, terakhir pada hari Sabtu (09/11/2024) jam 13.30 WIB.

Berkunjung ke Desa Pandansari menuju ke balai desa Pandansari dan ditemui yang mengaku perangkat desa bagian Kaur Pembangunan, dan mengarahkan kepada Kepala Desa Lasmu'i untuk ditemui, setelah cek dan pengambilan gambar balai desa, langsung menuju kerumah Kepala Desa Lasmu'i, tetapi tidak ada ditempat dan diarahkan ke Toko Bangunan milik Kades Lasmu'i, itupun juga tidak ada di tempat. Terkait anggaran RT dan RW yang diduga melanggar aturan dan hukum layak dilaporkan BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan APH (Aparat Penegak Hukum). Hingga berita ini terbit Kades Lasmu'i belum bisa dikonfirmasi. (Son)

hak/gaji kami saat ini ada dugaan digelapkan oleh Kades Lasmu'i. "Kami be-rani mengatakan hal tersebut, sampai hari ini hak/gaji kami belum dibayarkan," jelas RT - RW Desa Pandansari.

Belum selesai satu persoalan muncul persoalan lain yang sangat - sangat fatal terkait pengaduan beberapa warga, pada Tim Media berkelanjutan sampai menyampaikan terkait balai desa yang sudah selama ini

Pimpin High Level Meeting TPID Kota Probolinggo, Ini Arahan Pj. Wali Kota



Penjabat Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan saat memimpin jalannya giat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO, BN - Penjabat Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan memimpin jalannya giat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo, di Singosari Room, Bale Hinggil, Kamis (14/11). HLM TPID ini bertujuan untuk memperkuat sinergi mendukung stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan jelang Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas inflasi jelang hari besar keagamaan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kota Probolinggo. Tahun 2025 mendatang Presiden mancaangkan laju pertumbuhan itu delapan persen. Ini juga menjadi catatan krusial bagi kita," ujar Taufik.

Orang nomor satu di Kota Bayuangga ini mengatakan, pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, Presiden RI, memberikan arahan kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah, untuk melakukan strategi pengamanan produksi, dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan.

"Jangan lupa, ada juga faktor lain juga yang harus dicermati. Ini penting karena kita berada dalam situasi Pilkada, di mana mungkin saja akan ada pengalihan bagi-bagi sembako atau pembelian sembako dalam jumlah besar-besaran. Minta tolong Satgas Pangan dipantau terus, ya. Termasuk kondisi-kondisi lain yang perlu kita cermati dan mungkin berpengaruh terhadap iklim investasi dan inflasi," pesannya.

Senada dengan yang disampaikan Pj Taufik, Asis-

ten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono mewakili Ketua Harian TPID setempat drg Ninik Ira Wibawati menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan presiden tersebut, TPID Kota Probolinggo telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi dalam bingkai 4K. 4K tersebut meliputi aspek Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah-langkah strategis yang diambil, dirancang untuk memastikan stabilitas inflasi yang berkelanjutan. Dengan inflasi yang terkendali, diharapkan akan tercipta iklim ekonomi yang kondusif, mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat

Pj Bupati Jadi Irup Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-494

PAMEKASAN, BN - Dalam rangka memperingati hari jadi Pamekasan ke-494 yang bertepatan pada tanggal 03 Nopember 2024 maka pemerintah kabupaten Pamekasan melaksanakan upacara bendera yang bertempat di lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan Jalan Pamong praja, Minggu (02/11/2024).

Inspektur upacara pada puncak peringatan hari jadi Pamekasan yang ke 494 itu dipimpin langsung oleh Pj bupati Pamekasan Masrukin S.Sos, Msi yang di ikuti oleh peserta upacara dengan memakai baju adat Madura terdiri dari seluruh pejabat

KHUSUS WARGA JATIM
KEPUB NO. 100.3.31.550/KPTS/03/2024



PEMBEBASAN PAJAK DAERAH 2024

Dilaksanakan Mulai : **1 OKTOBER 2024 s/d 30 NOVEMBER 2024**

MEMPERINGATI HUT KE - 79 PROVINSI JAWA TIMUR

AYO LUR MANFAATKAN SEKERA

BEBAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA (BBN II)

BEBAS SANKSI ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PKB DAN BBNKB

BEBAS PKB PROGRESIF

BEBAS DENDA SWDKLLJ UNTUK TAHUN LEWAT

INFORMASI | HUBUNGI KANTOR BERSAMA SAMSAT SETEMPAT DI SELURUH JAWA TIMUR

Rehabilitasi SLB ABC Putra Pasundan 1 kota Banjar Disorot, Anggaran Rp 244 Juta Tanpa Pengawasan Dinas



Papan proyek rehabilitasi SLB ABC Putra Pasundan 1 kota Banjar.

BANJAR, BN - Rehabilitasi dua ruang kelas di SLB ABC Putra Pasundan 1 kota Banjar dengan anggaran sebesar Rp 244 juta kembali

menjadi sorotan. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara swakelola dengan Haris Saepudin sebagai pelaksana lapangan dan Heru

Wibowo sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Namun, proyek ini disinyalir berjalan tanpa pengawasan langsung dari Dinas KCD Priangan Wilayah XIII, yang seharusnya memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

Kepala bidang pengawasan bagian SLB HAKIM saat dikonfirmasi lewat WhatsApp mengatakan lagi ada giat di luar kota, begitu juga kepala KCD wilayah XIII tidak ada di tempat.

Pihak sekolah dan pelaksana lapangan mengaku sudah menjalankan rehabilitasi sesuai bestek yang telah disepakati. Meski demikian, absennya pengawasan dari pihak dinas menuai kekhawatiran akan potensi penyimpangan. Upaya untuk mengonfirmasi pihak Dinas KCD Priangan Wilayah XIII menemui jalan buntu, lantaran Kepala Bidang, Hakim, tidak dapat dikonfirmasi terkait perkembangan proyek ini.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah untuk peningkatan fasilitas pendidikan. Diharapkan, dengan adanya perhatian dari pihak terkait, proyek ini dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa dan lingkungan pendidikan di SLB ABC Putra Pasundan 1 kota Banjar. (Asep Sujana)

Kades Ciranggem Karman Siapkan Mobil Untuk Layani Masyarakat yang Membutuhkan

SUMEDANG, BN - Kebutuhan masyarakat apabila ada orang sakit atau yang membutuhkan kendaraan operasional yang ada di Desa, Kepala Desa Ciranggem Karman Hermawan di depan Sekretaris Desa Udin Samsudin mengatakan bahwa kendaraan siap pakai bila mana diperlukan oleh masyarakat baik untuk keluarganya yang sakit maupun kebutuhan lain lain yang penting kita sama sama merawatnya.

Terkait plat nomor memang ada pertanyaan pihak lain kenapa tidak memakai plat nomor merah, Kepala Desa Karman mengatakan, tentang plat nomor kami sudah koordinasi dengan Inspektorat dan BPMPD tanggapannya dikembalikan kepada Kepala Desa, silahkan urus mau dibuat plat merah atau plat hitam.

Sebelum membeli kendaraan kami musyawarah dengan



Kepala Desa Ciranggem Karman Hermawan.

BPD saat itu memang ada seorang anggota yang mengatakan tidak setuju kalau dibuat untuk Ambulan Desa, makanya kami mengusulkan untuk membuat STNK Plat nomor hitam karena kendaraan tersebut dibeli untuk digunakan di Bumdes, intinya kendaraan tersebut harus dipakai agar produktif untuk usaha untuk meringankan agar ada tambahan untuk biaya pemeliharaan seperti ganti oli, bensin, jangan sampai merogoh kantong sendiri.

"Terkait papan proyek setiap kegiatan kami selalu membuat, namun kemungkinan besar ada papan proyek tapi melihatnya hanya sepintas bisa saja dibuat buat disebarluaskan kegiatan tidak ada papan proyeknya, padahal semua pekerjaan fisik selalu musyawarah dulu baik dengan BPD maupun RT dan RW", tegasnya. (ernawan)

Rehab Ruang Kelas SDN Sanepa Berjalan Lancar



Ruang kelas SDN Sanepa, Kecamatan Buahdua yang direhab,

SUMEDANG, BN - Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Sanepa di Kecamatan Buahdua dikerjakan oleh CV Restoe Boemi, pekerjaan ini adalah pekerjaan rehab dua ruang kelas yang dianggarkan dari dana APBD sebesar Rp.149.950.000,-

CV. Restoe Boemi mengerjakan pekerjaan ini berdasarkan SPK no.04/SPK/PPK/Rehab.SDN

Sanepa/Disdik/2024. Pekerjaan ini dikerjakan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024. CV. Restoe Boemi beralamat kantor di Dusun Balong RT.05 RW.02 Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

Saat ditemui Pelaksana Pekerjaan di lapangan hari Kamis 31 Oktober 2024 mengatakan, benar pekerjaan rehab ini dikerjakan oleh CV. Restoe Boemi mudah mudahan pekerjaan lancar sampai selesai.

Saat dikonfirmasi Su-

karya, Spd selaku Pjs. Kepala SDN Sanepa mengatakan, "Ruang kelas memang sudah lama kekurangan menurut idealnya tetapi saat ini mungkin pihak dinas memperhitungkan dengan keadaan siswa hanya kurang dari 100 orang dan ini memang hampir tiap penggantian Kepala Sekolah selalu membicarakan tentang kekurangan ruang belajar, ini kami hanya mengusulkan yang penting saat ini anak siswa siswi kami masih tetap belajar di ruang kelas yang telah disediakan," tuturnya. (ernawan h)

Haji Bambang Hidayah Usung Program Unggulan Demi Kemakmuran Masyarakat Banjar

BANJAR, BN - Pertemuan calon wali kota Banjar Haji Bambang nomor urut 4 di Lingkungan Cimenyan 2 RT 05 RW 07 kelurahan Mekarsari kota Banjar pada hari Rabu jam 19.00 di salah seorang rumah warga Leni.

Calon Wali Kota Banjar, Haji Bambang Hidayah, dan wakil walikota Dani Danil Muklis, Nomor urut 4 memaparkan program-program unggulan untuk mewujudkan masyarakat Banjar yang lebih makmur dan sejahtera. Berbagai program ini mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, pengembangan Sungai Citanduy sebagai destinasi wisata, dan peningkatan infrastruktur.

Dalam sektor ekonomi, Haji Bambang menegaskan komitmennya untuk memberdayakan pelaku UMKM. "UMKM adalah penggerak ekonomi masyarakat. Dengan pelatihan, akses permodalan, dan dukungan yang lebih luas, kita bisa memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Haji Bambang juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses. Dalam programnya, ia berencana untuk membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



Di bidang pendidikan, Haji Bambang menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki mutu pendidikan mulai dari SD hingga SMA/SMK. Ia berjanji akan menyediakan fasilitas yang memadai, program beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa dari keluarga kurang mampu, serta mendukung peningkatan kualitas guru.

Selain itu, Haji Bambang merencanakan pengembangan Sungai Citanduy menjadi destinasi wisata lokal. Langkah ini diharapkan bisa menarik wisatawan sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar dengan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner dan kerajinan lokal.

Peningkatan infrastruktur juga menjadi prioritas Haji Bambang untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan dilakukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi produk lokal menjadi lebih lancar.

Dengan beragam program unggulan ini, Haji Bambang optimis bahwa dirinya bisa membawa perubahan signifikan bagi Kota Banjar. "Kami siap bekerja keras untuk Banjar yang lebih maju, makmur, dan sejahtera," tutup Haji Bambang dalam pernyataannya. (Asep Sujana)

Kades Mekar Rahayu Asep Suherman Punya 3 Program Unggulan



Kades Mekar Rahayu Asep Suherman saat menunjukkan buah anggur yang bakal dipanen. (ernawan)

SUMEDANG, BN - Tak salah pilih mengangkat seorang pemimpin di Desa Mekar Rahayu untuk Asep Suherman, karena beberapa orang sumber mengatakan bahwa tepat seorang pemimpin menurut teori mengatakan harus bisa memegang 3 katagori.

Pertama; Tut Wuri Handayani yang artinya bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadikan panutan dan ikutan bagi orang orang yang dipimpinnya. Kedua seorang pemimpin harus bisa menerapkan Ingarso Sung Tulodo yang artinya, bahwa seorang pemimpin harus bisa menuladani bagi orang orang yang dipimpinnya. Ketiga bahwa seorang pemimpin harus bisa menerapkan Ing Madio Mangun Karso, bahwa seorang pemimpin harus punya karya yang nyata yang bisa ditiru oleh masyarakatnya.

Saat ditemui Asep Suherman selaku Kepala Desa Mekar Rahayu mengatakan, terkait pembangunan di Desa Mekar Rahayu penerapan fisik dari Dana Desa (DD) Tahun 2024.diterapkan kepada pekerjaan rabat beton, hotmik Jl.Sukawenang dan Objek Wisata Anggur.

Asep Suherman saat dikonfirmasi di hadapan Babin Kamtibmas dan Sekretaris Desa memaparkan tentang Perkembangan objek Wisata di Mekarrahayu yang sangat digemari masyarakat, yakni dalam waktu dekat ini akan panen anggur. Panen anggur ini tentu sangat membanggakan warga karena akan menyedot minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Mekar Rahayu.

Ditambahkan Asep saat ditemui BN, 1 November 2024 menambahkan, desa Mekarrahayu mempunyai 3 Unggulan yaitu 1) Genteng yaitu Gerakan atasi Stunting.2) Jitu Rahayu yaitu Gaji dan Tunjangan Kades untuk masyarakat Mekar Rahayu.3) Parawisata buah Anggur, Jeruk dan Durian Puncak Rahayu. (Ernawan)

Pemkot Banjar Gelar Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi KPM PKH Tahun 2024



Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi KPM PKH Tahun 2024 oleh Pemkot Banjar.

BANJAR, BN - Dalam upaya menekan angka stunting di wilayah Kecamatan Langensari, Pemerintah Kota Banjar mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Langensari Ajat Sudrajat, Sekretaris Dinas Sosial Tata, dan Kepala Bidang Irawan.

Dalam sambutannya, Camat Jajat Sudrajat menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh, pola makan bergizi, dan sanitasi yang baik. "Peningkatan kualitas hidup dimulai dari keluarga. Dengan pola makan yang baik dan lingkungan yang bersih, kita dapat mencegah stunting sejak dini," ujarnya. Ajat juga mengajak KPM PKH untuk aktif mengikuti program ini dan menerapkan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi. Sekretaris Dinas Sosial, Tata, menambahkan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. "Pemerintah berkomitmen membantu keluarga dalam memberikan asupan gizi yang seimbang dan pola hidup sehat, agar anak-anak kita tumbuh sehat dan produktif," kata Tata dalam sambutannya.

Menurut Kepala Bidang, Irawan, sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi bekal praktis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan anak-anak mereka. "Kegiatan ini bukan sekadar informasi, tetapi langkah konkret yang harus kita jalankan bersama untuk masa depan yang lebih baik," ungkap Irawan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran KPM PKH tentang pentingnya pencegahan stunting, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di tahun 2024. (Asep Sujana)

DKK Kendal Diduga Giring Peserta BinteK Posyandu Menangkan Cabup No.3



Kader Posyandu saat mengikuti binteK (Foto: ist)

KENDAL, BN - Persaingan menuju Kendal 1 semakin memanas mendekati hari H pemilihan Bupati serentak. Masa kampanye dimanfaatkan oleh Cabup dan tim suksesnya untuk berupaya meraih suara terbanyak.

Baru baru ini beredar video Sekdin DKK Kendal diduga menggiring peserta binteK dalam hal ini Kader

Posyandu untuk mensukseskan Calon Bupati nomor 3.

Dalam video yang beredar dengan durasi 22 detik ini salah satu narasumber binteK DKK mengatakan bahwa, "jadi kehadiran panjenengan disini adalah bagaimana supaya pak Basuki bisa menang dan apa saja yang perlu dipersiapkan," ucapnya.

Menindaklanjuti beredarnya video itu, awak media berupaya menghubungi Kepala DKK Kendal melalui telepon WhatsApp di nomor 0812-282X-XXX beberapa kali belum berhasil, chatting via WhatsApp nampak centang 1.

Sumber media ini mengatakan, dalam video tersebut sangat jelas ketidaknetralan Dinas Kesehatan Kendal yang sudah mengundang secara resmi Kader Posyandu untuk binteK tapi disisipi kampanye untuk memenangkan Paslon Cabup nomor 3.

Masih Sumber media ini memaparkan, perlu diketahui netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pemerintah juga telah menerbitkan SKB yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, yaitu SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang telah ditetapkan pada September 2022.

Pasal 280 ayat (2) huruf f menyebutkan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN". Lebih lanjut Pasal 493 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran pasal ini yaitu Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

"Dengan kejadian tersebut Bawaslur harus mengambil sikap tegas dalam menindak pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh ASN tanpa pandang bulu," ujar sumber itu. (tim)

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Setuju Polres Gandeng Pemkab Dukung Kemandirian Pangan

BLITAR, BN - Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi mengakui dirinya sangat menyetujui langkah Polres Blitar menggandeng pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam mewujudkan asta cita 100 hari presiden Prabowo.

Menurut Kuwat panggilan akrab Supriyadi, "Kolaborasi Polres Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Bli-

tar, khususnya dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan," kata Kuwat di sela-sela acara penandatanganan asta cita 100 hari presiden Prabowo.

Penandatanganan MoU ini dilakukan antara Polres Blitar dan Pemkab Blitar dengan tujuan mengoptimalkan lahan pertanian untuk mendukung produksi pangan nasional. Selain itu, kerja sama ini juga mempertegas peran penting aparat keamanan dalam mendukung program-program strategis yang bertujuan untuk ketahanan pangan.

Dalam kesempatan ini, Polres Blitar juga menjalin kerjasama

ma dengan CV Lang Buana melalui Primkoppol Resor Blitar untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Polres. CV Lang Buana, yang bergerak dalam bidang produksi pertanian, khususnya akan bekerja sama dengan Primkoppol dalam memanfaatkan lahan Polres Blitar sebagai lokasi pengembangan dan produksi benih jagung hibrida.

Sementara Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adisatria menyatakan, langkah ini adalah wujud nyata dukungan Polres Blitar dalam menyukseskan Asta Cita, yang mengedepankan pentingnya kemandirian pangan di

setiap daerah. "Dengan kerja sama yang terjalin, Polres Blitar berupaya memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat serta mendorong Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang mandiri dalam produksi pangan, khususnya jagung," kata AKBP Wiwit.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan produksi benih jagung di Kabupaten Blitar dapat semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan di tingkat nasional. (Adv/Sastro)



Ketua DPRD kabupaten Blitar bersama Kapolres Blitar dan PJ Bupati Blitar Dr Djumadi.

Pjs Bupati Blitar Dampingi Mendes PD TT Lepas Ekspor Kendang Djembe



Pjs Bupati Blitar Dampingi Mendes PD TT Melihat Pengrajin Kendang Djembe di Desa Ngoran.

BLITAR, BN - Pjs Bupati Blitar mendampingi kunjungan Mendes RI ke Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan Pelepasan Ekspor Kendang Djembe Desa Sejahtera Astra (DSA) Tahun 2024 di Halaman Gedung Serbaguna Desa Ngoran, Selasa (05/11/2024).

Turut hadir di acara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto, Anggota DPRD RI dari Fraksi

PAN, DPMB Provinsi Jawa Timur, Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah beserta jajaran, Berapa staf ahli dari Kementerian RI, Anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah terkait.

Camat dan Anggota Forkopimcam Nglegok, Kepala Desa se Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Wlingi, Ketua BPD se Kecamatan Nglegok dan anggota BPD Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Perangkat

Desa, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pokdarwis Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar juga terlihat mengikuti.

Perangkat Organisasi dan Pegawai BUM Desa Karya Mandiri Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Direktur BUMDESMA Galang Bareng dan BUMDESMA Anugerah Sejahtera dan para pengrajin Kendang Djembe.

Dalam sambutannya Pjs

Bupati Blitar Jumadi mengatakan, saya menyampaikan selamat datang, kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto, Pj Gubernur Jawa Timur, Bapak Adhy Karyono dan PT. Astra Internasional Tbk.

"Kehormatan bagi kami, tentunya juga kebahagiaan tersendiri bagi saudara-saudara pengrajin kendang djembe. Karena angangan mereka agar produksi kendang djembanya bisa ekspor, hari ini bisa terwujud," kata Jumadi.

Ini berkat dukungan dari PT. Astra Internasional Tbk melalui programnya yakni Desa Sejahtera Astra (DSA) dimana Astra turut serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas produk unggulan Desa.

la juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk PT. Astra Internasional Tbk. Demikian juga atas

pula dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta seluruh pihak, karena berkat dukungan panjenjengan semua, kendang djembe Kabupaten Blitar bisa menembus pasar global dan semakin dikenal.

"Ini wujud komitmen bersama untuk mengangkat produk unggulan agar ada peningkatan kesejahteraan pengrajin, membuka lapangan kerja dan tentunya mendatangkan devisa," kata Jumadi.

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pula bahwa pengrajin Kendang Djembe di Kabupaten Blitar ini selain ada di wilayah Kecamatan Nglegok, juga ada di Kecamatan Kanigoro, Gandusari, Srengat dan Wlingi. Pihaknya juga telah melakukan pendampingan mulai dari kemudahan perizinan, pelatihan juga pangsa pasar.

"Kami juga terus mendorong para pengrajin untuk

terus berinovasi agar produk semakin berkualitas, mengingat persaingan pasar semakin ketat. Saya juga berharap, supaya PT. Astra Internasional Tbk bisa mengakomodir produk unggulan lain yang ada di Kabupaten Blitar supaya bisa go international," katanya.

Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten Blitar yang dikenal dengan sebutan Land Of Kings (tanah para raja), dimana dimakamkan atau disemayakannya abu dari raja-raja pendiri kerajaan di nusantara ini, seperti Raden Wijaya di Candi Singing dan Sang Presiden Pertama, Ir. Soekarno yang juga dimakamkan di Blitar.

"Selain itu, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi wisata baik wisata alam, seni budaya, kuliner dan berbagai produk unggulan hasil UMKM.

"Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22

kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar sekitar 1,2 juta jiwa. Kegiatan di sektor pertanian masih memegang peranan utama dalam tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar," terangnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengatakan, kami sangat mengapresiasi kepada pendamping Desa Ngoran Kecamatan Nglegok ini, karena berkat bimbingan dan pendampingannya, Warga Desa Ngoran melalui Bumdesnya bisa membuat kerajinan kendang Djembe ini.

"Produksi kendang Djembe ini sudah bisa memasuki Ekspor ke Negara Cina, dan nilai jualnya juga mencapai 10 milyar per bulan, semoga dengan keterampilan warga Desa Ngoran ini masyarakatnya semakin sejahtera," tandasnya.

(Adv/Sastro)

Penanggulangan Bencana Longsor Saluran Dadi Plaosan Selesai Dikerjakan



Proyek Penanggulangan Bencana Longsor Saluran Dadi Plaosan tampak sudah selesai dikerjakan.

MAGETAN, BN - Seusai kiren desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

akibat ambrolnya tembok pengaman dan longsornya saluran irigasi pada hari Kamis kemarin (7/3/2024) telah mengalami perbaikan darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi tahun 2024 dan pekerjaan itu pun sudah selesai.

Rusni salah satu tokoh masyarakat Plaosan menyampaikan, Saluran irigasi Dadi itu terletak di Kelurahan Plaosan dan ini tempat menampung aliran air dari kawasan Jalan Tembus.

"Saluran irigasi Dadi 2 mengalir baku sawah seluas 117 Hektar. Yang meliputi 16 Hektar sawah yang terletak di Desa Dadi dan 101 Hektar di Kel Plaosan," ujarnya

Lanjut Rusni pula, selesai nya Rehab atau renovasi tem-

bok pengaman dan Saluran irigasi Dadi usai pekerjaan tersebut mengartikan bahwa saluran irigasi dadi itu para petani kureng, gulung, Kauman dan Sale sangat berterima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Magetan dengan rampungnya pekerjaan itu sehingga para petani sekitar itu, sawah-sawahnya bisa terairi dengan lancar dan kemungkinan meminilisir ambrol atau longsor kedepannya.

Camat Plaosan Dian Maheru lewat seluler menyampaikan, terima kasih kepada Dinas PUPR Kabupaten Magetan, karena dengan direhabnya saluran irigasi Dadi maka keamanan saluran air untuk irigasi wilayah kelurahan Plaosan

akan semakin terjaga. Terlebih memasuki musim hujan bencana hidrometeorologi yang ada, menjadikan saluran lebih kuat.

Akhir kata Camat Dian Plaosan mengucapkan Alhamdulillah dengan rampungnya pekerjaan renovasi

saluran irigasi yang telah berjalan lancar dimana kedepannya akan memaksimalkan hasil panen baik tanaman pokok dan tanaman hortikultura/sayuran.

Ulin dari Bidang SDA Dinas PUPR Kab Magetan mengutarakan, rehab tem-

bok pengaman se tinggi 7 meter dan panjang saluran 150 meter dan waktu pengerjaan kurang lebih 60 hari Kalender dan menggunakan Anggaran sebesar Rp. 178.120.000,00 ini sudah selesai pengerjaannya.

(Adv/Asnar)

Kejar Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Trenggalek Laksanakan Sosialisasi dan Desk

TRENGGALEK, BN - Jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja karena memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Program ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi, mencegah pekerja dan keluarganya terjerumus ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi atau pemutusan hubungan kerja. Selain itu, jaminan sosial juga mendukung kesejahteraan jangka panjang, memastikan bahwa semua pekerja, termasuk yang di sektor informal, memiliki akses ke perlindungan yang memadai.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan memang merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang penting. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah



dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayahnya.

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kedepan menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pemerintah Pusat menargetkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2045 sebesar 83,29% dengan baseline Tahun 2025 sebesar 26,30%, sedangkan target Jangka Menengah akan ditetapkan dalam RPJMD baru yang nanti akan disusun. (ADV/Nonik)



Keluarga Besar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magetan

Mengucapkan
SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOPEMBER
1945 - 2024

Pengorbanan Para Pahlawan
Sebagai semangat membangun
Negeri ini


WAKIL I
H. PUTHUT PUJONO, S.H.


KETUA
H. SURATNO


WAKIL II
H. SUYATNO, S.Sos.


WAKIL III
Dr. PANGAJOMAN, S.H., M.M.

Pemkab Bogor Berkomitmen Wujudkan Budaya Inovasi, Wujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas



Berbagai moment Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri saat membuka kegiatan Penganugerahan Gelar Inovasi Daerah Kab Bogor ke-9 di Cibinong City Mall, Jum'at (8/11/2024).



BOGOR, BN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen untuk mewujudkan budaya inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dikatakan Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri saat membuka kegiatan Penganugerahan Gelar Inovasi Daerah Kab Bogor ke-9 di Cibinong City Mall, Jum'at (8/11/2024).

Gelar Inovasi Daerah Kab Bogor tahun 2024, kali ini mengusung tema "Inovasi Berdaya Saing dan Berbasis Pembangunan Aparatur dan Masyarakat, dalam Pemanfaatan Potensi Ung-

gulan Daerah untuk Kab Bogor Maju". Ditengah kegiatan tersebut diberikan sejumlah penghargaan kepada sejumlah karya inovasi untuk kategori perangkat daerah, Puskesmas, dosen atau

peneliti, masyarakat umum, SMA atau SMK, dan SMP. Serta penghargaan untuk duta inovasi desa, duta inovasi terfavorit, penghargaan khusus dan pemberian sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 10 produk inovasi.

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyampaikan, sangat penting bagi aparat pemerintah daerah untuk menciptakan berbagai inovasi, agar dapat membe-

rikan layanan yang lebih berkualitas, baik dalam lingkup internal birokrasi, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Langkah-langkah inovatif diperlukan untuk memastikan bahwa perbaikan perangkat tidak hanya menjadi statistik belaka, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Bachril.

Bachril menjelaskan, Pemkab Bogor berkomitmen mendukung peningkatan kemampuan inovasi. Pada tahun 2024, beberapa hasil inovasi dari kompetisi ini akan didaftarkan dalam aplikasi kekayaan intelektual untuk mendapatkan hak cipta. Upaya ini akan terus diperluas untuk memperoleh lebih banyak Hak Kekayaan Intelektual guna mempercepat peningkatan inovasi dan penerapannya demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya ucapkan selamat kepada semua penerima penghargaan inovasi daerah ini. Prestasi ini adalah bukti komitmen dan kerja keras saudara, dalam menjadikan Kab Bogor menjadi lebih baik. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi semua orang, untuk terus berinovasi dan berkontribusi untuk perkembangan Kabupaten Bogor," jelas Bachril.

mendorong pengembangan ide-ide baru, yang bermanfaat bagi Kabupaten Bogor. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada panitia dan kepada tim penilai inovasi yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Untuk diketahui, juara pertama kategori perangkat daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan inovasi Laporan Pak. Juara pertama kategori Puskesmas adalah Puskesmas Rumpin dengan inovasi BUMIL P3DE (Ibu Hamil Periksa Triple Eliminasi di Posyandu). Juara pertama kategori dosen atau peneliti adalah Dr. Abdullah Baharun dari Universitas Djuanda dengan inovasi Ayam Kampung Pedaging Unggul Unida. Juara pertama kategori masyarakat umum adalah Ivan Taufiq dari Kecamatan Dramaga dengan inovasi produk inovasi berbasis herbal. Juara pertama kategori SMA atau SMK adalah Fauzi Bayu dari SMAN 1 Cigombong de-

ngan inovasi Kulkas Mini. Juara pertama kategori SMP adalah Umar Ahmad dari SMPN 2 Kemang dengan inovasi Pengembangan Gemy Sebagai Chatbot Asisten Belajar Siswa Di SMPN 2 Kemang. Sementara peraih penghargaan juara pertama Duta Inovasi Desa adalah Sukma Kelana dari Institut Agama Islam Sahid. Diberikan juga penghargaan untuk duta inovasi terfavorit diantaranya kepada Universitas Indonesia, Universitas Nusa Bangsa, STAI Sirojul Falah, Universitas Pakuan, dan STAI Al Hidayah.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perguruan tinggi. (eml/adv)



Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Pemprov Jatim - Pemkab Madiun Gelar Gerakan Pangan Murah

MADIUN, BN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) menggelar kegiatan gerakan pangan murah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus pengendalian inflasi yang terjadi di daerah, pada hari Jumat (15/11/2024) bertempat di lapangan Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Gerakan pangan murah ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat supaya tidak terganggu.

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan DKPP Kabupaten Madiun, Cahyo Kumolo pada kesempatan itu menuturkan, untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan pasokan pangan strategis seperti beras, gula, minyak, tepung, bawang merah/putih, Pemerintah Kabupaten Madiun bersinergi dengan Pemprov Jatim gelar gerakan pangan murah.

Lanjutnya, "Menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan Nataru, biasanya terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok strategis cukup signifikan. Antisipasi pemerintah dengan mengadakan gerakan pangan murah sebagai langkah strategis untuk menstabilkan pasokan pangan serta harga di pasar. Gerakan ini diharapkan juga dapat meredam gejolak inflasi yang disebabkan oleh



fluktuasi harga bahan pokok, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang wajar," ujarnya.

Dinas ketahanan pangan dan peternakan Kabupaten Madiun, sampai bulan november sudah menggelar 33 kali "gerakan pangan murah" yang pelaksanaannya tersebar di wilayah Kabupaten

Madiun. Selain itu juga selalu melakukan pantauan harga di 8 pasar, menghitung neraca pangan strategis dan panel harga pangan serta bekerja sama dengan DPMD membentuk kios pangan di desa-desa, imbuhnya.

Sementara itu, ketua tim kerja distribusi pangan dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi Jawa timur, Sukemi mengatakan, "Tujuan dari gerakan pangan murah ini untuk menjaga stabilitas harga dan stok bahan kebutuhan pokok. Kegiatan ini sebagai upaya kami untuk meyakinkan masyarakat, bahwa stok bahan pangan aman serta harga terjangkau dan dari bulan oktober - Desember kami akan gelar GPM di 46 kota/kab. wilayah Prov. Jawa timur," tuturnya.

Di sisi lain, Esti salah satu warga setempat yang belanja di GPM mengatakan, kegiatan seperti gerakan pangan murah ini sangat membantu masyarakat mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau bahkan sedikit lebih murah dari harga di pasaran, sehingga cukup meringankan.

"Kami sangat terbantu dan berharap dalam waktu dekat bisa diadakan lagi, supaya warga mudah mendapatkan sembako dengan harga terjangkau, apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru, pasti harga harga akan naik," pungkasnya.

(Adv)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Tingkatkan Pelayanan

BOGOR, BN - Untuk mewujudkan pelayanan prima pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 gencar-gencarnya meningkatkan pelayanan di seluruh bidang pelayanan, untuk proses pembuatan sertipikat tanah di wilayah hukum Kabupaten Bogor.

Program ini diterapkan oleh pejabat tinggi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, semua pegawai harus merubah mindset berpikir tentang pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan mengajukan berkas tentang pertanahan, dan tentunya ada reformasi mental diseluruh pegawai.

Kasubag Tata Usaha (TU-red) Kantor Pertanahan Kab Bogor 1 Muhaimin Hamidun saat ditemui BN diruang kerjanya, Kamis (14/11/2024) mengatakan, semua pegawai harus mempunyai jiwa pelayanan yang baik, "Kalau bekerja di Kantor Pertanahan harus mempunyai jiwa sebagai pelayan," tegas Kasubag Muhaimin Hamidun.

Lanjut Kasubag Muhaimin Hamidun, pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 sedang percepatan



pelayanan diantaranya proses pelayanan sertipikat PTSL sebanyak 50 ribu bidang tanah, proses sertipikat tanah milik aset Pemerintah Kab Bogor, proses sertipikat tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan proses sertipikat tanah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Muhaimin Hamidun, bahwa berkat peningkatan pelayanan disegala bidang belum.lama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 mendapat piagam penghargaan Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Kepala Kantor Pertanahan Kab Bogor 1 Budi Kristiyana Menrima Piagam Penghargaan Anugerah Pajak Daerah Dari Pj.Bupati Bogor Bachril Bakri

"Piagam penghargaan Anugerah Pajak daerah Kabupaten Bogor diserahkan langsung oleh Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, pada Selasa (12/11/2024), yang diterima langsung oleh Kakan Budi Kristiyana," kata Muhaimin Hamidun.

(eml)

Pejabat BUMD Kab Bandung Diduga Terlibat Politik Praktis, Kuasa Hukum Pelapor: Kami Akan Terus Kawal



kuasa hukumnya dari kantor Advokat Panca Soera.

Pada kesempatan itu, Kuasa Hukum Pelapor Acep Onoz, menjelaskan temuan lapangan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PENGUMUMAN RUPS PEMBUBARAN PT. LUMIERE DIGITAL BRANDING

Berdasarkan Keputusan Sirkuler RUPS PT. Lumiere Digital Branding ("Perseroan") tanggal 1-10-2024, telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan sejak tanggal 1-10-2024

Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, SH, MS: Wartawan Jangan Jadi Corong di Swasta dan Pemerintah

JAKARTA, BN - Sebanyak 50 wartawan dari berbagai perusahaan media cetak dan elektronik di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung mengunjungi kantor Dewan Pers Jl. Kebon Sirih 32-34 Jakarta Pusat dan Kantor Berita Antara di Jakarta. Kunjungan yang difasilitasi diskominfo Pemkab Belitung ini untuk menimba ilmu dan pengarahan dalam bekerja sebagai wartawan dan nantinya akan dipraktekkan saat menjalankan tugas di Belitung.

Ketua Dewan Pers menerima langsung kedatangan wartawan dari media cetak dan online, televisi yang biasa bertugas meliput di berbagai sektor baik pemerintahan dan swasta, di Kabupaten Belitung.

Dalam sambutannya, Ninik mengatakan dengan rasa bahagia, dan selamat datang di Dewan Pers, karena telah bisa berjumpa dengan rekan rekan jurnalis dari Kabupaten Belitung. Selanjutnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menghimbau agar Wartawan serta perusahaan Pers wajib mengedepankan azaz praduga tidak bersalah dalam setiap pemberitaan.

"Saya selaku Ketua Dewan Pers berpesan agar tetap bersikap indenpenden, karena Pers dibentuk untuk mendidik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, Profesi yang mulia dan bermartabat ini kita harus selalu menjaga 4 prinsip dasar 1. Perusahaan Pers harus Profesional, 2. Wartawan harus Profesional, selain patuh dan berpatokan dalam 11 pasal Kode Etik Jurnalistik, tetap selalu menguji Nara Sumber, harus bisa membedakan fungsi berita dengan bisnis, Jaga moralitas, jaga hubungan dengan pemerintah, jangan menjadi corong di swasta maupun di Pemerintah. Jika hanya corong lebih baik berhenti saja menjadi wartawan," tegas Ninik.

Ninik meminta wartawan terus meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti uji kompetensi wartawan mulai dari tingkat muda, madya dan utama.



Rombongan wartawan dan Diskominfo Kabupaten Belitung berfoto bersama dengan Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, SH, MS di kantor Dewan Pers Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Srt)

Ninik juga menjelaskan tentang pentingnya perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kegiatan peliputan di lapangan.

Ketua Dewan Pers menjelaskan telah menjalin kerjasama dengan Polri terkait perlindungan terhadap wartawan apabila semua pemberitaan telah cukup mengandung unsur yang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka tidak boleh dikriminalisasi jargon sekali kali mengambil pemberitaan dari media sosial.

Sementara Kadis Kominfo Belitung Muhamad Iqbal menyampaikan peserta yang hadir di Dewan Pers ini adalah bentuk dari sinergitas antara Pemkab Belitung dan rekan rekan Pers, kunjungan ini untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan menimba ilmu agar bisa sebagai bekal untuk pulang kembali ke Kabupaten Belitung.

Kunjungan ini diakhiri sesi tanya jawab, dimana Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan pentingnya organisasi pers untuk mengarahkan dan mengingatkan anggotanya, ia juga menyampaikan hingga saat ini ada beberapa asosiasi pers yang terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers antara lain AJI, PWI, SMSI, IJTI yang berjumlah lebih dari 11 asosiasi. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Pemerintah, Pers dan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas jurnalis di Kabupaten Belitung.

Hari berikutnya para rombongan jurnalis Belitung melakukan tatap muka dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang diterima langsung oleh pimpinan dan staf LKBN. LKBN sebagai Lembaga Pemerintah itu menjelaskan bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, mereka menyebarkan informasi perjuangan hingga kini masih tetap memberikan Informasi informasi yang akurat demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. (srt)

Pemkab Beltim Uji Coba Pemberian Makan Siang Gratis



MANGGAR, BN - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar simulasi Pemberian Makan Siang Bergizi dan Gratis bagi siswa sekolah. Simulasi pertama ini dilaksanakan di Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar, Kamis (14/11/24). Simulasi dimulai dari proses pengadaan makanan hingga distribusi ke siswa sekolah. Simulasi ini melibatkan berbagai OPD teknis di Pemkab Beltim, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Per-

tanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim serta pihak swasta untuk proses pembiayaan simulasi.

"Kita berkomitmen untuk memulai melaksanakan uji coba terkait dengan Program Pemerintah Pusat, dalam hal ini Program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yaitu Makan Siang Bergizi Gratis bagi Siswa Sekolah," kata Asma-wa di SD Negeri 18 Manggar.

Program ini untuk menjalankan Asta Cita ke-4 dari Pemerintah, yakni dalam rangka mewujudkan sumber manusia yang unggul. Di

mana kegiatan tidak menggunakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

"Tentu harapannya dengan pemberian makanan bergizi sejak dini kepada anak-anak, maka sumber daya manusia akan lebih cerdas, pintar dan lebih sehat," kata Asmawa.

Setelah uji coba pertama di Kecamatan Manggar ini Pemkab Beltim akan melanjutkan kegiatan untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Beltim. Dengan sasaran kepada siswa sekolah baik, PAUD/TK, SD dan SMP dengan tetap berkolaborasi dengan pihak swasta yang ada. (diskominfobeltim/as)

Pemeliharaan Jalan Sulaiman Amin KM 8 Palembang Rp 4,5 M Patut Diawasi

PALEMBANG, BN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palembang Mulai Terlihat Gencar Memperbaiki Sebagian Badan Jalan Sulaiman Amin Km 8 Palembang Yang diduga menindaklanjuti Surat Somasi Nomor:11/KT/PW/TOFAN-RI/XI/2024 Yang di sampaikan oleh Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia Menegakkan Supremasi Hukum dan Keadilan yang ditujukan untuk dan atas Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Tertanggal 07/11/2024 namun pihak Dinas PUPR Palembang tersebut belum ada Klarifikasi menyangkut narasi yang tercantum di dalam Surat tersebut,

Adapun isi Surat Somasi dalam Hal Pertanyaan? yang dimaksud adalah Alokasi Dana Pemeliharaan Jalan Sulaiman Amin yang menghubungkan Antara Jalan Kol.H.Burlianke Jalan Soekarno Hattah Km 8 dengan ukuran Panjang ± 2 Kilo meter, yang Gunakan Dana Tahun Anggaran APBD 2024 Besar Nilai Anggaran Rp.4,5 M.

Selanjutnya dan Manfaat daripada uang sebesar itu yang dinilai fantastis bagi pihak pengguna Jalan dan Warga Masyarakat sekitarmengatakan apa pun alas an itu sungguh



Proyek Pemeliharaan Jalan Sulaiman Amin KM 8.

tidak sebanding antara fisik hasil pengerjaan dengan Dana yang di Gelontorkan Pemerintah terangnya.

Ditambahkannya lagi di Kota Palembang Terdiridari 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan jika di Telusuri jangan-jangan di beberapa Ruas Jalan yang ada di Wilayah Kota Palembang adalagi yang lebih parah dari kondisi fisik Jalan di Sulaiman Amin tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikutnya UU No.14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.UU ini telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Sirlani/Kenedy)

Paslon Subandi-Mimik ...

mereka berlanjut ke makam KH Ali Mas'ud, atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Ud, di Pagerwojo.

Subandi dan Mimik Idayana melantunkan doa agar diberikan keberkahan serta perlindungan dalam memimpin Sidoarjo, seraya mengingat ajaran-ajaran kebaikan yang diwariskan Mbah Ud kepada masyarakat.

"Kami berdoa agar Allah SWT memberi izin dan kemudahan dalam upaya kami untuk membawa perubahan bagi Sidoarjo,"

"Bagi kami, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ungkap Subandi, dengan nada penuh

harap.

Ziarah tersebut dilanjutkan ke makam Bupati pertama Sidoarjo, RTP Tjokronegoro I, sosok yang dikenal sebagai perintis pemerintahan Sidoarjo. Di sana, mereka kembali berdoa agar semangat kepemimpinian yang amanah dan berintegritas dari para pendahulu dapat menjadi teladan dalam menjalankan tugas di masa mendatang.

"Kita harus selalu ingat bahwa setiap jabatan yang kita emban akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ini adalah pengingat bagi kami agar senantiasa menjaga kejujuran dan ketulusan dalam melayani masyarakat," tutur Subandi. (Ted)

Sambungan hal 2

BPBD Pakpak Bharat Gelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana



Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana BPBD Pakpak Bharat Gelar di Balai Diklat Cikaok, Jumat 1 Nopember 2024.

PAKPAK BHARAT, BN - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui BPBD, melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten / Kota di Balai Diklat Cikaok, Jumat, 01 November 2024.

"Dari data yang ada bahwa Risiko bencana yang tinggi dan kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM dan Peralatan) yang kita miliki belum mampu untuk melakukan penanggulangan bencana secara maksimal. dan sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana yaitu bencana adalah urusan bersama maka perlu dilakukan penguatan penguatan di tingkat Desa, baik dari sisi SDM, Peralatan dan juga dari sisi Pendanaan. maka, Kepada Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk urusan kebencanaan yang tentunya melalui mekanisme aturan yang ada" Demikian sepeppnggal dari pengantar yang disampaikan oleh Kepala BPBD Pakpak Bharat Agustus Harapan Padang, ST, MSi

Tampil dalam Kegiatan tersebut sebagai Narasumber yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provsu Manuter Parulian Naibaho, S.Sos, SH, MSi. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provsu Drs. Daryus M Sinulingga, M.SP. dan Kepala Bidang Pemdes dan Pemasdes David Tedoh Manik, SAB, M.Ec.Dev.

Acara yang dihadiri oleh Para Camat dan Para Kepala Desa dan Masyarakat tersebut berjalan dengan baik dan lancar. "Mari kita melaksanakan penanggulangan bencana di daerah kita masing masing dengan baik, dan apa yang kita dapat dari seluruh paparan dari narasumber dapat kita terapkan di daerah kita sehingga penanganan bencana kedepan dapat semakin baik". Demikian arahan Kepala BPBD sekaligus menutup acara. (T.Tumangger)

Diskominfo SP Beltim Gelar Pelatihan Menulis Ilmiah dan Kreatif



Pelatihan Menulis Ilmiah dan Kreatif Diskominfo SP Beltim. (istt)

MANGGAR, BN - Setiap wartawan harus memiliki itikad dan tujuan yang baik dalam melaksanakan tugas kewartawannya terasuk pedoman 5 W 1 H untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Mantan Koresponden Kompas, Tokyo, Dr. Yusron Ihza yang merupakan Alumnus Tsukuba University, Japan, saat berbicara di depan peserta pelatihan menulis ilmiah dan kreatif di Pondok Kopi, Manggar, Kamis (14/11).

Acara yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Belitung Timur (Beltim) ini dihadiri Kepala Dinas Diskominfo SP Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo, Dr. Dewi Lusiana selaku Dosen Universitas Indonesia dan Dr. Mahardhika Zifana selaku dosen UPI Bandung.

"Kita menulis berita tentunya ada maksud, tujuan dan nilai berita. Semua kembali pada hati, itikad atau niat dan tujuan yang baik. Ini yang harus menjadi perhatian bagi tiap wartawan," kata Dr. Yusron.

Di era transformasi digital saat ini, Yusron menyampaikan ilmu jurnalistik bukan hanya mengenai berita yang menarik, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kebenaran, kebaikan dan integritas. "Dengan pedoman dan teknik penulisan berita 5W + 1H, niat dan tujuan menyampaikan pesan kepada masyarakat, akan tercapai prinsip kebaikan dan kebenaran terutama di era digital saat ini," ujar mantan koresponden Kompas ini.

Yusron berharap setiap wartawan yang memiliki tugas mulia, dapat terus menyampaikan informasi dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Untuk itu, penting bagi insan pers agar selalu membekali diri dengan pengetahuan, kompetensi dan semangat yang tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bayu Priyambodo mengapresiasi kehadiran tiga narasumber dalam memberikan pengetahuan bagi wartawan di Beltim. "Saya mengapresiasi kehadiran narasumber dari praktisi dan akademisi untuk memberikan pengetahuan di era transformasi digital saat ini," ungkap Bayu. (diskominfobeltim/as)

Distangan Beltim Gelar Tahapan ke-4 RAD Sawit Berkelanjutan



Kepala Distangan Beltim Heryanto. (ist)

MANGGAR, BN - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan di Auditorium Zahari MZ, Jum'at (15/11/24).

Kegiatan FGD atau konsultasi publik ini merupakan tahapan ke-4 dalam penyusunan (RAD) Kelapa sawit berkelanjutan. Di mana masukan dari pemangku kepentingan akan diserap untuk dimasukkan dalam dokumen.

Para pemangku kepentingan yang diundang meliputi perusahaan sawit, para petani dan pekerja sawit, koperasi sawit, LSM di bidang lingkungan serta OPD yang terkait dalam penyusunan RAD Sawit berkelanjutan.

"Di sini kita mengumpulkan saran, masukan dan perbaikan terhadap matriks program yang akan dilaksanakan di kelapa sawit berkelanjutan. Termasuk dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu seputa kelapa sawit," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distangan) Kabupaten Beltim, Heryanto.

Setidaknya ada lima 5 isu kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Beltim yang dibahas. Mulai dari penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar.

"Dari hasil evaluasi atau advise narasumber kita, harus dilakukan sinkronisasi RAD dan RAN (Rencana Aksi Nasional). Mengingat ada satu program kita yang tidak sinkron," ungkap Danton sapaan Heryanto.

Satu program yang belum pas menurut Danton terkait masalah nomenklatur pendataan. Di mana penyediaan pendataan yang digunakan oleh Kabupaten Beltim menggunakan pembinaan pembinaan perizinan usaha. @2!

Galian C Diduga Ilegal Rusak Lingkungan Desa Pematang

LABURA, BN - Kepala Desa (Kades) Hatapang Hutana Sihombing diduga pemilik galian C ilegal. Akibatnya, lingkungan sekitar Lokasi tambang mengalami kerusakan yang parah. Informasi diperoleh Koran Bidik Nasional (BN) dan bidiknasional.com (bn.com) di lapangan, kegiatan eskavator menggali tambang pasir dan batuan dari aliran sungai merusak sempadan dan perubahan bentang alam secara dratis di desa Hatapang. Padahal Sungai itu menjadi sumber air vital bagi masyarakat dan ekosistem sekitar, ini terancam oleh aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mendapatkan tindakan hukuman yang tegas.



Lokasi Galian C di Desa Pematang Kabupaten Labuhanbatu Utara, tampak lingkungan rusak terkena alat berat. (M.Sukma)

Kepala desa Hatapang Hutana Sihombing saat dikonfirmasi jurnalis bn.com via telepon Whatsapp terkait galian C ilegal tersebut, walau berdering Hutana tidak menjawab. Dan jurnalis BN konfirmasi via pesan singkat WA ke nomor 08217294XXXX, Hutana juga tidak menjawab walau sudah dibaca terlihat pesan conteng dua warna biru.

Wartawan BN/bn.com konfirmasi ke Kepala dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPM PTSP) Labuhanbatu Utara Zulkarnaen, SKM, MM, saat di konfirmasi ada nya galian C ilegal di desa Hatapang,

Zulkarnaen mengatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk Kades Hatapang Hutana Sihombing.

Zulkarnaen menambahkan, "Kalau ijin sudah di provinsi bang, kita enggak ada wewenang mengeluarkan ijin galian C, kalau memang tidak ada ijin nya kita koordinasikan ke Sat Pol PP selaku penegak Perda dan Bapenda tentang PAD," ucapnya.

Terpisah Kepala Disperindag ESDM Sumut, Mulyadi Simatupang M. Si di konfirmasi jurnalis bn.com terkait galian C ilegal di Labuhanbatu Utara di desa Hatapang kecamatan NA IX-X, mengatakan, "Masih rapat mendampingi Pj Gubsu di Kantor Gubsu Lt. 10 dengan anggota DPD Dr. Badikenita Sitepu, sabar ya adinda

masih berlangsung rapatnya." BN/bn.com informasikan ke Kadis PMD M. Nur Lubis perihal ada nya tambang galian C diduga ilegal tersebut, M. Nur mengatakan, "Baru tahu ini, coba koordinasi, ini kades nya payah dan nanti kita infokan."

Disisi lain Kapolsek NA IX-X AKP Yustina saat mendapat info dari jurnalis bn.com ada nya tambang galian C diduga ilegal di desa Hatapang yang merusak lingkungan dan jalan sehingga menjadi konflik. Masyarakat mengucapkan, "terima kasih info nya bang, akan kita cek di lapangan," pungkasnya. (M.Sukma)

Satpol PP Bintang Stop Tambang Pasir Ilegal



Sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bintang saat menutup tambang pasir ilegal. (handoko)

BINTAN, BN- Atas penambangan pasir ilegal yang berlokasi di jalan nasional lintas barat km 23, yang sudah berjalan satu bulan ini, sudah membuat masyarakat pengguna jalan umum resah, lantaran jalan kotor akibat pasir dan tanah berserakan di jalan tersebut, di tambah pula dengan debu yang semakin parah membuat pengguna jalan terganggu.

Pada waktu media BN berada di lokasi tambang tersebut itu tampak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bintang dengan mobil patroli sebanyak 10 personil menyetop aksi tambang di lokasi itu. Kepala seksi (Kasi) penyidikan Sumadi mengatakan, "Kami ke lokasi tambang pasir ilegal ini setelah dapat keluhan dari masyarakat mengenai jalandi sekitar areal tambang ini kotor

akibat lori pasir ke luar masuk dari areal tambang," kata Sumadi.

Maka dari itu, kata Sumadi, "Kami tegur dan kami tanyakan atas izin dari tambang, ternyata mereka tidak punya ijin, kami sebagai Satpol PP Bintang terpaksa tiga titik tambang untuk sementara ditutup. Ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) no.1 tahun 2020, bahwa kami di sini melakukan pengawasan penertiban umum," tandas Sumadi. Pada kesempatan ini BN menjumpai si penambang namanya Adi, ia mengatakan, "Kami nambang di sini memang tak ada izin tambang, tapi lantaran ada yang mengkoordinir, yah kami nambang," katanya.

"Apalagi sudah ada yang penanggung jawab di lokasi tambang ini namanya Ringgo, semua yang ada tambang di sini itu dia semua yang megang," tandasnya. (Handoko)

Pemkab Asahan Selenggarakan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) 2024



Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Em Noor, S.Sos.

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan selenggarakan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) dan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Em Noor,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Pemkab Asahan Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan



Pjs Bupati Asahan Drs Basari Yunus Tanjung, M.Si, saat tabur bunga.

Pahlawan di Jalan Lintas Sumatera, Senin (11/11/2024). Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan diikuti oleh Pjs Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kajari Asahan, Danlanal TBA, Ketua PN Kisaran, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danyon 126/KC, TNI-Polri, Para Pahlawan, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, OKP dan anak Pramuka.

Upacara berlangsung dengan khidmat dengan adanya peletakkan karangan bunga di tugu monumen Taman Makam Pahlawan oleh Kapolres Asahan serta tabur bunga di seluruh makam pahlawan. Kegiatan upacara ini diakhiri dengan melakukan sesi photo bersama Forkopimda Kabupaten Asahan ditugu monumen Taman Makam Pahlawan untuk mengabadikan kegiatan upacara tersebut.

Usai melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan Pjs Bupati Asahan Drs Basari Yunus Tanjung MSI mengatakan, upacara ini bukan sekedar seremonial semata. Namun diharapkan para penerus bangsa dalam hal ini seluruh peserta upacara dapat meneladani semangat para pahlawan. "Kita jadikan moment ini sebagai refleksi, bagaimana kita meneladani para pahlawan, yang kita wujudkan dengan kompetensi diri untuk membangun negara ini," imbaunya. (T.P)

ASAHAN, BN - Memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam

Pemkab Asahan Serahkan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu



Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Asahan Drs. Muhilli Lubis, M.M.

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (13/11/2024). Tampak hadir Pjs. Bupati Asahan yang dalam Hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Asisten Perencanaan dan Pembangunan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Mewakili Kejari Asahan, para mahasiswa penerima beasiswa beserta orang

tua/wali.

Pjs. Bupati Asahan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Muhilli Lubis, M.M dalam pidatonya menyampaikan perasaan senangnya karena dapat melihat para mahasiswa/i yang berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk membantu meringankan biaya perkuliahan. Pemerintah Kabupaten Asahan senantiasa berusaha memberikan manfaat khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu.

Muhilli juga menyampaikan persaingan hidup kedepan tidak gampang, maka diperlukan sumber daya yang unggul karena itu merupakan kunci kemenangan dari persaingan tersebut. "Mahasiswa/i berprestasi seperti adik-adik ini yang nantinya menjadi generasi penerus, yang mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Asahan," ujar Muhilli.

Lebih lanjut Muhilli berpesan kepada orang tua atau wali untuk terus memberikan dukungan kepada adik-adik mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan sebaik-baiknya dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk memimpin Kabupaten Ashan kedepannya sehingga terwujudnya visi dan misi Asahan yaitu masyarakat Asahan yang religius dan berkarakter. (T.P)

Pjs. Bupati Pakpak Bharat Dr. Naslindo Sirait Buka Lokakarya Guru Penggerak



Pjs. Bupati Pakpak Bharat Dr. Naslindo Sirait.

PAKPAK BHARAT, BN - Pjs. Bupati Pakpak Bharat,

Dr. Naslindo Sirait membuka lokakarya Guru Penggerak Kabupaten Pakpak Bharat Rabu (30/10/2024) di Gedung Serba Guna, Salak.

Naslindo menyampaikan bahwa kondisi pendidikan yang belum merata terutama soal kualitas pendidikan di kota dan di daerah diperlukan kehadiran guru penggerak yang mampu menjadi agen perubahan sosial, memimpin perubahan di segala bidang dan mendorong komunitas belajar dan juga anak didik untuk bisa meraih penge-

tahuan, keterampilan yang diperlukan. Dengan guru penggerak diharapkan guru mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

Kehadiran guru penggerak di Pakpak Bharat sangat di harapkan untuk mewujudkan transformasi sosial di Kabupaten Pakpak Bharat.

Naslindo berharap

bahwa tugas utama guru saat ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi lebih memberikan teladan, menginspirasi dan memotivasi siswa untuk dapat meraih masa depan mereka. Ini lah filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani.

Untuk bisa menjadi penggerak guru harus terpanggil dan memiliki passion sehingga kesulitan apapun kondisi di lapangan

guru terus dapat menggerakkan dan memimpin perubahan di tengah-tengah masyarakat.

Naslindo berharap para guru benar benar belajar dari alam, belajar dari situasi anak didik dan memberi

kan mereka pelayanan yang baik dengan setulus hati. Naslindo percaya dengan jalur pendidikan yang akan membawa kesadaran akan mempercepat kemajuan di segala bidang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat.

(T.Tumangger)

Nasional Singkat

Pjs Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Hari Pahlawan



Pakpak Bharat, BN - Pjs Bupati Pakpak Bharat Naslindo Sirait memimpin upacara hari pahlawan 10 Nopember 2024. Dalam kesempatan itu ia membacakan pidato tertulis dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah; "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu". Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani Pahlawanmu, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apa pun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan ketesiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. (T.Tumangger)

Pjs Bupati Pakpak Bharat Tinjau Pengolahan Lahan Untuk Pertanian Terpadu



PAKPAK BHARAT, BN - Pjs. Bupati Pakpak Bharat Dr. Naslindo Sirait untuk ke dua kalinya

meninjau pekerjaan pengolahan lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di desa Silimakuta, Pakpak Bharat bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Camat dan Kepala Desa Silimakuta (Kamis 31/10/2024). Pjs, Naslindo Sirait ingin memastikan bahwa pembersihan lahan dengan traktor sudah mulai dikerjakan. Di lokasi Pjs, Naslindo Sirait melihat lahan sudah mulai ditraktor dan akses menuju lokasi sudah di bersihkan oleh masyarakat bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pakpak Bharat. Naslindo Sirait berpesan agar terus dikerjakan, Target kita 5 hektar bisa kita buka agar penanaman cabai bisa kita kejar di November pas musim hujan ini, pesan dia. (T.Tumangger)

Pjs Bupati Pakpak Bharat Dr. Naslindo Sirait Pimpin Kerja Bhakti di Kota Salak



gotong royong, Naslindo memberikan pengarahan, tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.

PAKPAK BHARAT, BN - Pjs. Bupati Pakpak Bharat, Dr. Naslindo Sirait memimpin gotong-royong dan kebersihan di kota Salak dan sekitarnya (01/11/2024).

Gotong-royong ini diikuti para ASN, Personil Satpol PP, tenaga kebersihan, masyarakat dan unsur lainnya. Sebelum memulai gotong-

"Kota Salak ini tidak termasuk kota besar, tergolong kota kecil, tapi kalau kota kecil saja kita tidak bisa tata, maka tidak punya nilai yang tinggi. Tidak masalah kota kita kecil, tapi apik, rapi, indah, aman, itu menjadi kebanggaan. Kita mau menjadi warga kota Salak, kita mau tunjukkan kota kita kepada siapapun yang datang," tegas Naslindo Sirait.

"Hari ini mungkin persoalan tidak selesai, tapi kita bisa memulai. Maka berikan tenaganya, satu atau dua jam kedepan kita bisa bergotong-royong di kota Salak ini, sampah-sampah kita buang, saluran air kita bersihkan, sambil kita menyapa masyarakat, kita ajak supaya mereka juga dekat dengan kita, supaya kemudian kita bisa rutin melakukan kegiatan seperti ini," ucap Naslindo Sirait.

(T.Tumangger)

Pengadaan Disporapar Jombang Tahun 2023 Patut Disorot



Seperti pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang patut disorot karena diduga ada konspirasi jahat untuk kepentingan pribadi oknum-oknum bermental korupsi.

Pada pengadaan tahun anggaran 2023 Patut Dicurigai, karena ada dugaan ada tikus berdasi di Disporapar yang menggerogoti uang negara. Perlu diketahui, pada pengadaan Kaos/ Pakaian Olahraga, Bola Voli, Net Voli, Bendera Merah Putih, senilai Rp 248.018.400,- diduga telah di gerogoti oleh oknum - oknum untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan informasi yang diterima sumber bidiknasional.com (bn.com) oknum pejabat penting Disporapar Jombang bersama bawahannya diduga telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja "Menerapkan fee dan atau menerima cash back" sebesar 15%- 20% kepada rekanan

pemenang pengadaan.

Anggaran sebesar Rp 248 juta tahun anggaran 2023 tersebut diduga dibuat bancakan dengan kelompok yang terkait menangani pengadaan di Disporapar Jombang.

Berdasarkan hasil investigasi Media ini, diduga oknum Disporapar diduga sengaja me- Mark Up/ menggelembungkan anggaran dalam Pengadaan tersebut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Diduga penggelembungan harga satuan barang mencapai 100% dari harga riil baik di toko maupun di e- Katalog.

Menurut sumber itu, diduga oknum Disporapar ceroboh dalam melakukan evaluasi dan pengawasan dalam proses pengadaan tersebut yang senilai 248.018.000,- dan diduga sebagai pemenang hanya sekedar pinjam bendera.

Oknum Disporapar dan stafnya diduga tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh LKPP untuk mendasar kan pada regulasi yang berlaku dalam proses pengadaan sesuai petunjuk operasional yang berlaku, karena diduga telah mengatur proses pemilihan di e-

Katalog untuk mengarahkan ke salah satu rekanan pengadaan yang telah di siapkan sebagai pemenang.

Selain itu, ada dugaan bahwa oknum itu maupun oknum bendahara bersama sama telah melakukan "Perbuatan melawan hukum" dengan modus Memanipulasi data dan merekayasa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) atas pengadaan Kaos/ Pakaian Olah raga, Bola Voli, Net Voli, Bendera Merah Putih, Bendera - bendera senilai 248.018.000,- tahun anggaran 2023.

Sumber itu menambahkan, pada pengadaan di Disporapar Jombang diduga rawan dengan korupsi, karena diduga lemahnya proses perencanaan program dan anggaran. Disisi lain, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa. Selain itu, diduga rawan dengan tindak kecurangan atau penyelewengan," ungkapnya.

Sementara Kepala Disporapar Jombang dan PPK belum berhasil dikonfirmasi bn.com. Hak jawab dan klarifikasi ditunggu pemimpin redaksi bn.com Hp/WA : 08123209649 atau email bidiknasional@yahoo.com. (Tok)

JOMBANG, BN - Modus pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat menyebabkan korupsi antara lain : 1. Penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia jasa, 2. Pelaksanaan kontrak yang menyimpang dari prosedur, 3. Permasalahan pembayaran kontrak, 4. Layanan pengadaan Unit Pelayanan maupun APIP yang tidak responsif.

Korupsi dalam pengadaan dapat terjadi karena : 1. Lemahnya proses perencanaan program dan anggaran, 2. Minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa.

Pjs Bupati Asahan Ikuti Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2024-2029

ASAHAN, BN - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/677/KPTS/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 tentang Persemian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2024-2029, Ketua PN Kisaran Halida Rahardhini, SH, MHum mengambil Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2024-2029.

Pengambilan sumpah/ janji ini dilaksanakan di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan dan dihadiri Pjs Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, mewakili Kapolres Asahan, mewakili Kajari Asahan, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danyon 126/KC, mewakili Danlanal TBA, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya.

Dikesempatan ini Pjs Bupati Asahan Drs Basarin Yunus Tanjung MSI pada pidatonya mengatakan, posisi yang terhormat sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD bukanlah sekadar jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah



Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2024-2029

amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang lebih maju dan lebih sejahtera. Untuk itu, kiranya pimpinan yang baru ini, dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan melibatkan semua elemen politik dan masyarakat yang ada, bukan dengan mempertajam perbedaan, tetapi mencari persamaan serta untuk membuka kemungkinan bagi kerja sama yang lebih harmonis.

"Institusi DPRD merupakan sebuah simbol dari cita-cita Bangsa Indonesia yang ideal. Karena ditangan para Wakil Rakyat inilah, amanat rakyat ini diemban, sesuai dengan Sila ke Empat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", serta mampu menampung dan mengikuti keinginan masyarakat yang kian berkembang. DPRD hadir untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif, harmonis dan produktif sekaligus. hanya dengan semua inilah Demokrasi Indonesia akan menjadi demokrasi yang matang. Selain itu, DPRD juga adalah refleksi dari dinamika dan perkembangan di tanah air," ungkapnya. (T.P)

Pemkab Pinrang Raih 8 Penghargaan dari Pemprov Sulawesi Selatan



PINRANG, BN - Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih delapan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan dan disaksikan langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi

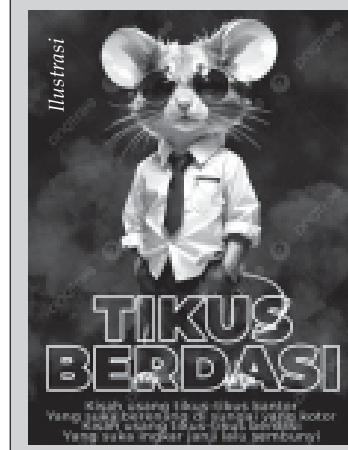
Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kepada Pj. Bupati Pinrang, H. Ahmadi Akil, S.E., M.M., serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang drg. Dyah Puspita Dewi, M.Kes di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (15/11/2024). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Pinrang, drg. Dyah Puspita Dewi, M.Kes., mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang yang terus berupaya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat di berbagai pelosok wilayah. "Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi agar kami bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Pinrang di sektor kesehatan," jelas drg. Dyah. Usai acara, Pj. Bupati Pinrang, H. Ahmadi Akil, menyampaikan

rasa bangganya atas keberhasilan Kabupaten Pinrang di sektor kesehatan ini.

Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata dari upaya kolaboratif antara Pemkab Pinrang dan jajaran Dinas Kesehatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. (Sabir)

"Tikus Berdasi" Ikut Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Jombang 2024 Tabrak UU 14 KIP



JOMBANG, BN - Desas desus ulah 'tikus berdasi', sudah tidak asing bagi masyarakat. Semakin berkembangnya 'tikus berdasi' di negeri ini menjadi suatu masalah yang sangat besar bagi bangsa. Semakin hari 'tikus berdasi' menggunakan kecekikannya. 'Tikus berdasi', sejatinya adalah pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang merupakan penjahat asli di negerinya sendiri.

Kecerdasan dan kecekikannya yang dimiliki oleh mereka digunakan untuk penipuan belaka dan tentunya merugikan banyak pihak. Seperti dalam pengadaan barang dan jasa di Gedung Dewan Jombang diduga ada 'tikus berdasi' yang haus uang rakyat.

Contoh seperti pada pengadaan barang dan jasa di DPRD Jombang, penyedia barang dan jasa merupakan salah satu pihak yang terlibat dan yang diuntungkan, selain itu Oknum di Sekretariat Dewan Jombang juga diduga ikut merasakan manisnya uang haram.

Informasi diperoleh bidiknasional.com (bn.com), ada pengadaan barang di Gedung DPRD Jombang penyedia jasa di tunjuk langsung untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa. Penunjukkan Langsung (PL) kepada CV Bina Sarana diduga sudah berjalan sejak tahun 2006 dan sampai tahun 2023, karena sudah dipercaya dan kinerjanya dianggap selalu berani mempertanggung jawabkan semua pekerjaan yang diberikan. Suatu kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. Dan itu karena antara CV Bina Sarana dan Pejabat yang ada di Sekretariat Dewan sudah punya hubungan "mesra" sejak lama.

Tetapi sampai dimana kinerja CV Bina Sarana selama ini di Gedung DPRD Jombang, patut disoroti. Menurut sumber bn.com, CV. Bina Sarana melakukan pekerjaan cleaning servis diduga tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu pada petugasnya yang seharusnya dikerjakan 10 orang, tetapi yang bekerja hanya 7 petugas kebersihan.

Pihak CV. Bina Sarana membantah, "bahwa CV. Bina Sarana melakukan sudah sesuai RAB, memang itu 7 orang petugas kebersihan, 2 sebagai OB dan 1 untuk pengawas, kan sudah benar itu. Sumber anda saya tahu itu," ujar pemilik CV. Bina Sarana yang minta namanya tak disebutkan di media ini.

Soal anggaran pengadaan cleaning servis dari tahun 2006 masih kecil hingga tahun 2023 naik menjadi 198 juta per tahun nya, sedangkan anggaran itu untuk gaji karyawan (petugas cleaning servis, Office Boy (OB), Pengawas) dan untuk pembelian alat untuk cleaning servis dan lain - lain" ungkapnya.

"Kalau diperhitungkan pada pengadaan cleaning servis di Gedung Dewan Jombang keuntungan itu berapa sih, tidak seberapa, karena saya juga masih punya kerja yang lain, seperti di Surabaya dan lain lain nya. Saya sebelum bekerja disini sudah punya usaha yang lain," tambahnya.

Ketika ditanya pada pengadaan cleaning servis dari anggaran per tahun kurang lebih Rp 198 juta, menurut informasi ditambah Rp 30 juta di ambil dari anggaran pemeliharaan taman sehingga anggaran untuk taman habis dan untuk perawatan taman tidak dilakukan.

Menurut pemilik CV. Bina Sarana, "Tidak benar itu, bisa dilihat atau di cek, taman tetap dikerjakan, ada beberapa tanaman baru di situ dan beberapa pot ada bungunya di halaman gedung dewan. Semuanya sudah saya lakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang tidak saya lakukan, jadi semua informasi yang menyudutkan saya itu tidak benar, dan bisa saja pertanggung jawabkan, termasuk pada pengadaan pakaian.

Menurut sumber bn.com, perlu diketahui pada pengadaan pakaian tahun 2024 ini patut disorot karena pada anggaran nya dipecah menjadi tiga (3) untuk jenis kegiatan. "Sebenarnya itu tidak di benarkan, masak untuk pengadaan pakaian dinas disamakan dengan pengadaan mamin (makan minum)," ujar sumber tersebut.

"Kalau tahun 2024 ini CV Bina Sarana sudah tidak ikut terlibat pada pengadaan barang dan jasa di gedung dewan lagi," ujarnya.

Ketika bn.com menanyakan, siapa penyedia jasa untuk pengadaan pakaian dinas di Gedung Dewan Jombang? Siapa penyedia jasa yang melakukan pengadaan barang dan jasa di DPRD? Pemilik CV. Bina Sarana mengatakan, "Saya tidak tahu CV. siapa sekarang yang mengerjakan," jawabnya.

Dugaan pat gulipat dalam pengadaan di dewan Jombang diduga melanggar Undang- Undang Informasi Publik Nomor 14, Tahun 2008. Padahal tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Semuanya harus terbuka, keterbukaan informasi publik memberikan manfaat, adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan, pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. (Tok)

Festival Jong di Desa Sebondong Perek Terus Ditingkatkan



Festival Jong di Desa Sebondong Perek, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. (handoko)

BINTAN, BN- Kegiatan even tahunan Jong di desa mandiri Sebondong Perek melibatkan seluruh masyarakat di kecamatan Teluk Sebondong. Acara ini menonjolkan permainan masyarakat Melayu di desa Sebondong Perek, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) dengan peserta sekitar 300 Jong dengan tipe satu, Jong besar, Jong sedang dan Jong kecil.

Pada waktu media Bidik Nasional (BN) menjumpai kepala desa Sebondong Perek Bahri di sela sela acara itu mengatakan, "Dalam acara festival Jong yang kita adakan tiap tahun ini adalah even yang tak kan bisa dipisahkan kepada masyarakat desa Melayu Perek," kata Kades.

Menurut Bahri, ini adalah menunjang pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) desa tahunan yang harus kita tingkatkan seperti yang kita lihat saat ini, ada jualan kuliner, makanan untuk para pengunjung serta penjual permainan anak anak.

Dan di samping itu pula kita ada juga memberi sembako untuk lansia sebanyak 106 orang, yang mana dalam satu kantong itu berisikan beras 15 kg, minyak goreng 1kg, teh dan gula pasir 1kg. Sedang dinas kesehatan Bintan mengadakan pemeriksaan tensi darah serta pemeriksaan kesehatan lainnya gratis. (handoko)

Pasokan Solar Terlambat, Antrian Truk Isi BBM SPBU Bintan Mengular

BINTAN, BN - Dalam beberapa Minggu ini SPBU di daerah jalan Uban, antrian kendaraan roda enam begitu panjang sampai 300 meter untuk mendapatkan minyak solar. Dalam antrian ini ketika media BN menjumpai salah seorang sopir bernama Anam mengatakan, antrian ini diakibatkan lori dari Tanjung Pinang mengisi di Bintan dan ditambah lagi dengan pengisian BBM Pertamina ini sering terlambat, mengakibatkan antrian kendaraan pun bertambah panjang.

Pada waktu media BN menjumpai kepala Dinas Perhubungan Bintan Moh Insan Amin di ruang kerjanya mengatakan, "kita sudah koordinasi kepada dinas terkait, namun ini semuanya kesalahan Pertamina dalam pengisiannya terlambat, membuat kendaraan roda enam maupun roda empat terpaksa jadi antri. Padahal seharusnya Pertamina mengoperasikan atas SPBU nya itu jam 7 pagi bukannya jam 10 pagi," kata Insan. (handoko)

Kepala Dinas Perhubungan Bintan Moh Insan Amin.



Konsultan Proyek ...

Keterangan diperoleh BN, baik untuk nama konsultan perencanaan maupun konsultan pengawas, tidak pernah dicantumkan, hal ini ada dugaan kesengajaan. Sebab menurut informasi, "Bahwa Dinas Pendidikan Jombang terkait proyek rehab sekolahan diduga hanya mempercayakan kepada salah satu konsultan untuk mengerjakan sebagai konsultan perencanaan maupun pengawas di beberapa proyek rehab sekolahan, mungkin takut kedoknya terbongkar karena memiliki satu CV,

sehingga setiap papan proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Jombang, nama konsultan kosong. Ini dugaan permainan PPK dengan salah satu konsultan yang dipercaya," ungkap sumber BN.

Menurut sebuah sumber kepada Bidik Nasional (BN), "Salah satu pejabat Dinas Pendidikan Jombang yang menangani pengadaan barang dan diduga bermain "Patgulipat" untuk mengelur uang negara melalui konsultan yang dipercaya, modusnya diduga kon-

sultan yang di percaya tersebut mau bagi fee dengan pejabat tersebut. Terlihat setiap ada proyek rehab sekolahan, papan proyek selalu menyembunyikan nama konsultan," ungkap sumber itu. Selain itu menurut informasi yang di terima BN, bahwa konsultan tersebut juga di percaya untuk mengatur rekanan yang ingin paket proyek PL, ujar sumber itu.

Di Dinas Pendidikan Jombang saat ini diduga masih berjalan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepo-

tisme) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dugaan modus yang di lakukan saat ini terlihat rapi, tidak seperti dulu yang selalu mencolok.

Salah satu pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Jombang, Rendra ketika dikonfirmasi soal papan nama proyek yang selalu tidak mencantumkan nama konsultan, mengatakan, "Kalau tidak ada, ya nanti kita suruh pasang nama konsultan nya," ujarnya.

Tetapi apakah nama konsultan pada papan proyek

sudah dipasang, ternyata sampai sekarang masih banyak yang belum ada nama konsultan nya. Proyek yang sumber dananya dari APBD atau APBN, maka wajib hukumnya memasang papan proyek sesuai prosedur nya. Apabila ada proyek, terpasang papan nama proyek tidak memasang nama konsultan, itu jelas menabrak aturan. Bahkan patut diduga proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal. Memang regulasinya tentang aturan yang jelas

pada papan proyek agar bisa terlihat oleh publik secara jelas, karena berkaitan dengan prinsip transparansi, sebab konsultan dibayar melalui anggaran pembiayaan dari APBD atau APBN.

Menurut sumber BN, dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan dan dibiayai oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di papan proyek harus tertera jelas, diantaranya : 1. Papan proyek harus dipasang sebelum / selama kegiatan pembangunan ber-

langsung, 2. Papan proyek harus di tempatkan di lokasi yang mudah di lihat dan dipasang dengan rapi dan kust, 3. Papan proyek harus mencantumkan nama proyek, nama pemilik (CV) lokasi, tanggal izin pemborong, konsultan perencana, dan direksi pengawas, 4. Untuk proyek yang besar atau berada di pekarangan yang luas, papan proyek harus di pasang di beberapa tempat yang mudah di lihat, 5. Bentuk, ukuran, dan warna papan proyek akan di tempatkan kemudian. (totok)

Sambungan hal 1

KPK Tetapkan ...

BPK yang jadi tersangka," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan upaya manipulasi hasil audit proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api. Yang bersangkutan juga sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan. Meski demikian penyidik KPK belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut soal jabatan dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut.

"Penyidik sedang mendalami adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi temuan. Dari pihak BPK sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikannya masih berproses," ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik tersebut mengatakan saat ini KPK sedang mendalami berbagai proyek yang diaudit oleh tersangka, namun tidak menerangkan proyek apa saja yang diperiksa oleh komisi antirasuah.

"Agak lama karena banyaknya audit yang dilakukan oleh yang bersangkutan di beberapa lokasi, sehingga perlu didalam satu per satu," kata Tessa.

Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran uang ke pegawai BPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pekerjaan jalur kereta. "Saksi hadir semua dan didalam terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain," kata Tessa.

Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso.

KPK Periksa Cabup ...

Kabupaten Sidoarjo.

Achmad Amir Aslichin, yang juga merupakan calon bupati Sidoarjo nomor urut 2, diperiksa bersama beberapa pihak lain, termasuk dari sektor swasta dan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Mas Iin, ia memenuhi panggilan KPK serta tiba di kantor BPKP sekitar pukul 13.00 WIB. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pemeriksaannya berfokus pada kasus tiga tersangka mantan pimpinan DPRD Jawa Timur. "Saya diundang KPK untuk hadir pada pukul 13.00, namun baru mulai sekitar pukul 17.00 kurang, pemeriksaan itu

berlangsung setidaknya satu jam," ujar Mas Iin kepada BN.com kemarin, saat menghadiri acara setelah diperiksa KPK.

Menurut Mas Iin, pemeriksaan ini terkait kasus yang menyeret sejumlah mantan pimpinan DPRD Jawa Timur.

Perlu diketahui, sebelumnya KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus pengurusan dana hibah Pokmas, yang disebut-sebut melibatkan beberapa pejabat dan tokoh politik di Jawa Timur. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mereka diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Ti-

mur. "Pemeriksaan yang dilakukan itu untuk menggal lebih dalam informasi terkait aliran dana hibah ini," kata Tessa, dihimpun dari rekan-rekan media.

Lalu, pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK juga mengumumkan pengembangan penyelidikan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, yang terjadi pada Desember 2022. Berdasarkan pengembangan tersebut, kasus ini berujung pada penyidikan baru yang telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Kendati demikian, KPK

belum mengungkapkan identitas para tersangka secara resmi. "KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 5 Juli 2024, yang menetapkan 21 tersangka terkait kasus ini. Namun, kami masih dalam tahap pengumpulan bukti tambahan sebelum mengungkap identitas mereka," ujar Tessa.

Menurut KPK, dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ternyata dimanfaatkannya oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi. "Kami sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak yang turut andil dalam pengalihan dana ini," ungkap Tessa. (Ted)

Sambungan hal 1

Relawan Santri ...

Khofifah-Emil untuk dua periode," ujar Slamet di sela-sela deklarasi.

Ia menambahkan, alasan utama dukungan terhadap Khofifah-Emil adalah keberhasilan program-program yang mereka jalankan selama masa jabatan sebelumnya. Slamet menilai program tersebut berdampak signifikan, khususnya bagi pondok pesantren di Jawa Timur.

"Bu Khofifah dan Mas Emil telah membuktikan komitmen mereka dalam memperjuangkan kesejah-

taan masyarakat Jawa Timur, terutama santri dan pondok pesantren," tegasnya.

Menurutnya, sejumlah program yang diinisiasi oleh pasangan tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup para santri dan mendukung keberlangsungan pondok pesantren. "Kinerjanya selama ini sangat dirasakan oleh pondok pesantren di seluruh Jawa Timur," tambahnya.

Selain itu, Slamet juga menekankan pentingnya keberlanjutan program-pro-

gram yang telah berjalan agar Jawa Timur semakin maju dan berprestasi.

"Kami menginginkan Khofifah-Emil menjabat lagi agar Jawa Timur lebih maju dan memiliki daya saing tinggi," ungkapnya.

Deklarasi ini diikuti oleh perwakilan relawan dari 18 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Para relawan berkomitmen untuk mengamankan suara pasangan Khofifah-Emil di wilayah masing-masing. "Kami siap mengamankan suara

Khofifah-Emil di setiap kecamatan dan bekerja keras untuk memastikan kemenangan pasangan nomor dua," lanjut Slamet.

Dengan semangat tersebut, para relawan berharap pasangan Khofifah-Emil dapat melanjutkan kepemimpinan mereka dan membawa Jawa Timur maju berprestasi.

"Coblos nomor dua!" seru Slamet diikuti sorakan semangat para relawan yang hadir.

(ted)

Sambungan hal 1

Tuding Kesalahan ...

berproses di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dengan nomor perkara 275/Pdt.G/2024/PN Sda. Gugatan tersebut diajukan oleh PT CDN terhadap Didik Noga Ahfidianto" tegas Amrullah.

Sisi lain, kuasa hukum PT CDN, Siti Hamidah dikonfirmasi oleh rekan media, ia mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan kasus pertama yang dihadapi perusahaan tersebut. "Dalam pembangunan rumah, PT Chalidana selalu berdasarkan sertifikat tanah yang ada, kami sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara persuasif selama bertahun-tahun," jelas Siti.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan berbagai solusi yang meringankan, namun tidak ada respons positif dari pihak Didik Noga.

"Kami sudah memberikan solusi-solusi yang

Sambungan hal 1

seharusnya bisa diterima dengan baik, tetapi sayangnya tidak mendapat respons yang sesuai dari pihak pembeli," ujarnya.

Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa masalah ini tidak akan sampai ke ranah pengadilan jika Didik Noga tidak melakukan renovasi rumah tanpa izin pada tahun 2019. "Bapak Didik Noga melakukan renovasi menjadi tiga lantai tanpa seizin PT CDN, termasuk pada bagian belakang rumah," tuturnya.

Pihak pengembang menegaskan bahwa mereka hanya ingin kelebihan tanah yang menjadi hak mereka dihormati. Namun, dengan adanya tindakan renovasi tanpa izin, mereka merasa dirugikan. "Kami hanya meminta hak kami dihormati dan diakui," tegas Siti Hamidah. (Ted)

Bimtek Aplikasi ...

S.Sos di Aula SIG Hotel Antariksa Kisaran, Rabu (13/11/2024). Tampak hadir Kepala Dinas Sosial, Kepala OPD yang mewakili, narasumber Pusdatin Kemensos, peserta kegiatan bimbingan teknis dan para tamu undangan lainnya.

Em Noor, S.Sos selaku Kabid Perlindungan Jaminan Sosial mengatakan pada laporannya dimana kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu 13 November dengan tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis ini untuk meningkatkan kompetensi operator SIKS-NG terkait tugasnya sebagai pengisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial RI.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Oktoni Eriyanto menyampaikan dalam bimbingan dan arahnya bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang diperlukan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan basis data terpadu melalui sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu DTKS ini dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako yang kesemuanya itu terintegrasi dalam satu Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Lebih lanjut Oktoni menyampaikan SIKS-NG yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI diharapkan dapat mewujudkan basis data terpadu dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi secara berjenjang dan berkesinambungan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional. (TP)

Sambungan hal 8

Nyalur Listrik ...

melihatnya itu kalo yang di

lapangan itu pakai pembatas 16 amper setara 3500 ketika kita menyelesaikan berita acara lalu kita masukkan Aplikasi PLN itu muncul nominal itu," tambahnya.

Purwanto saat dikonfirmasi awak media terkait apakah pihak PLN mengetahui penyambungan yang dianggap ilegal ini. "Sudah lama tau," terangnya.

Hal ini tentunya menyebabkan adanya unsur pembiaran dari pihak PLN. PLN sebelumnya telah memutuskan sambungan tersebut namun oleh Ketua RT Sarkoni. Menurut Ketua RT penyambungan itu sudah melalui koordinasi dengan Purwanto, namun saat dikonfirmasi Purwanto tidak memperbolehkan menyambung namun supaya Ketua RT itu supaya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Di-

nas Perhubungan terkait pengusulan PJU.

Pada kesempatan yang sama, Nuryoko, SH, MH., selaku Kuasa Hukum Rudi Hartono bahwa kliennya meminta adanya perlakuan yang sama pihak PLN. "Jika memang ada yang mengambil listrik dari JTR dari tiang jangan sampai yang jadi korban klien kami secara sepihak. Ini kami meminta pertimbangan. Tanggapan dari PLN jika memang dipakai untuk umum nanti tolong dibantu klien kami membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa diarea parkir itu bukan ditanggung dia sendiri karena fasilitas umum. Jadi mohon diperlakukan yang sama sebagai warga dengan adanya ini kami meminta pada PLN untuk menertipkan dan diarahkan masyarakat untuk penerangan umum yang ka-

itannya dengan Dishub. Di perumahan ini kan belum ada PJU nanti akan disulunkan itu. Harapannya dengan klaim PLN itu yang mendenda klien kami dapat di dinetralisir atau di tanggung bersama warga karena itu untuk kepentingan umum. Berdasarkan kesepakatan dengan PLN Blitar mengajak musyawarah saja akhirnya dari pihak manajer diminta membuat surat pernyataan bahwa itu listrik tidak dipakai untuk pribadi tapi untuk umum," tutur Nuryoko.

Hari ini tadi korban melalui Kuasa Hukum meminta PLN Kota Blitar meminta pengecakan ulang dan hadir dilokasi ternyata masih ditemukan banyak masyarakat yang menyalurkan listrik secara langsung lewat JTR akhirnya ada penertipan di Perumahan Tlogo secara menyeluruh. (Tim)

Sambungan hal 3

Pj Bupati Jadi ...

pimpinan OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dari unsure TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga pasukan topeng gethak di kabupaten Pamekasan.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya Pj bupati Masrukin, S.sos, M.Si dengan menggunakan bahasa khas Madura menyampaikan puncak peringatan hari jadi Pamekasan ke 494 tahun 2024 kali ini dengan tema "Pamekasan Bersinergi Bersama Untuk Pamekasan Yang Lebih Baik" oleh karena itu pada hari ini seluruh lapisan masyarakat kabupaten Pamekasan merasa bangga dan bahagia sekali dengan menyambut peringatan ulang tahun hari jadi Pamekasan ke 494



Pj bupati Pamekasan Masrukin saat jadi Irup Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-494.

ini. "Areh samangken sadejeh magersareh Mekkasen angrasa bungah tor jhembbar amarge kabupaten Mekkasen teppak beber epon se kapeng 494," ucapnya. (Noerkholis)

Sambungan hal 4

TPID Kota Probolinggo ...

perekonomian secara keseluruhan. Stabilitas inflasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Wawan, meskipun tingkat inflasi di Kota Probolinggo pada triwulan tiga tahun ini dapat dikendalikan, namun TPID juga perlu mewaspadaikan tekanan inflasi pada permintaan jelang hari besar keagamaan nasional.

"Meskipun akan ada peningkatan inflasi, kami berharap ketersediaan pasokan pada momen HKBN tetap terjaga dan inflasi bisa menjadi pendorong kesejahteraan produsen di Kota Probolinggo," harap Wawan. Sebagai informasi, pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Probolinggo sebesar 1,93 persen. Pada bulan tersebut terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Probolinggo sebesar 1,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,62. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kota Probolinggo bulan Oktober 2024 sebesar 0,20 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,37 persen. (Son)

Sambungan hal 4

Pejabat BUMDs ...

keterlibatan salah satu dewan pengawas BUMD saat mendampingi salah satu paslon di Pilkada Kabupaten Bandung.

Ditegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan penanganan laporan tersebut di Bawaslu Kabupaten Bandung. Ia pun tidak mengharapkan jika temuan ini di-peti es-kan.

"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Bandung yang telah menerima laporan dugaan keterlibatan pejabat BUMD pada kontestasi Pilkada 2024. Bawaslu juga sudah meregister laporan kami. Namun, kami mendorong Bawaslu menjalankan tupoksi dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Acep di Soreang, Kamis (14/11/2024). (Zaen)

Sambungan hal 7

Pjs Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso Pimpin Rangkaian Peringatan Hari Pahlawan



Pjs Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso saat rangkaian kegiatan upacara hari pahlawan di halaman belakang Kantor Pemkab Kediri, dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kecamatan Pare, Minggu (10/11/2024).

untuk mencapai kemajuan senantiasa berubah seiring waktu, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ada.

Perubahan tersebut, kata Heru, tercermin dalam cara memaknai dan mengimplementasikan semangat kepahlawanan.

Di masa kolonial, pahlawan Indonesia berjuang melawan penjajahan. Kini, tantangan utama adalah mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan, yang masih menjadi akar permasalahan bangsa.

Menurut Heru, semangat kepahlawanan saat ini harus diarahkan pada upaya membangun kemakmuran, memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Heru berharap, peringatan Hari Pahlawan ini dapat membangkitkan semangat baru, yang menghasilkan inovasi yang sesuai dengan tantangan zaman. (Advkominfokabkdr/ND)

KEDIRI, BN - Pada peringatan Hari Pahlawan 2024, Pemerintah Kabupaten Kediri memulai rangkaian kegiatan dengan upacara di halaman belakang Kantor Pemkab Kediri, dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kecamatan Pare, Minggu (10/11/2024).

Ziarah dan tabur bunga yang diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri serta Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan salah satu bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud doa dan penghargaan yang pantas diberikan kepada para pahlawan atas perjuangan dan pengorbanan mereka. Tak hanya itu, di momen Hari Pahlawan, seharusnya terus menginspirasi untuk bertindak dan berpikir dengan semangat kepahlawanan.

Menurutnya, kecintaan terhadap Tanah Air merupakan kontribusi nyata dalam memajukan bangsa. Lebih lanjut, Heru menjelaskan, perjuangan bangsa



Pj. Gubernur Jatim Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

Pemkab Kediri Siap Hadapi Potensi Banjir di Akhir Tahun



Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono Pjs. Bupati Kediri Heru Wahono Santoso serta Forkopimda Kediri, jajaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur saat Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Bendung Gerak Waru Turi, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Selasa (5/11/2024).

tan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Selasa (5/11/2024).

Acara apel ini juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Kediri Heru Wahono Santoso serta Forkopimda Kediri, jajaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur dan berbagai instansi terkait. Adhy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen dalam kesiapsiagaan bencana.

Dalam acara tersebut, Adhy menegaskan pentingnya kesiapan dan kesigapan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, dan angin puting beliung.

Adhy menambahkan bahwa persiapan ini diharapkan mampu mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di provinsi tersebut.

Kesiapsiagaan yang diutamakan kali ini meliputi pelatihan lapangan, pengecekan peralatan, serta koordinasi antarlembaga. Pj. Gubernur Jatim juga meninjau peralatan tanggap darurat dan posko dapur umum yang disiagakan untuk mendukung penanganan bencana, khususnya di wilayah yang rawan terdampak banjir.

Adhy berharap indeks risiko bencana di Jawa Timur yang selama lima tahun terakhir berhasil turun dari angka 137,88 menjadi 101,65 dapat semakin menurun.

Pjs. Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, yang turut hadir, menekankan bahwa kesiapsiagaan di Kediri fokus pada kesiapan personel, peralatan, koordinasi, dan kesadaran masyarakat.

Dengan apel kesiapsiagaan ini, diharapkan seluruh elemen terkait dapat berkolaborasi menghadapi tantangan bencana hidrometeorologi demi keselamatan masyarakat Jawa Timur. (Advkominfokabkdr/ND)



Pemerintah
Kabupaten
Pasuruan



Direktorat Jendral
Bea dan Cukai



EXPLORE
WISATA PASURUAN

STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL

“Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.”

CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL

1. Tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos)
2. Dilekati dengan pita cukai palsu
3. Dilekati dengan pita cukai bekas
4. Dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya

Dr. Nurkholis, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM
Pj. Bupati Pasuruan

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT!
ATAU HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI 1500225

